



**ANALISIS PERSEPSI TENTANG PEMAHAMAN TRANSPARANSI,
AKUNTABEL, EKONOMIS, EFEKTIF DAN EFISIEN TERHADAP
REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH (STUDI KASUS:
ANGGARAN DINAS PEKERJAAN
UMUM KOTA MEDAN)**

SKRIPSI

Dijjukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Sosial Sains
Universitas Pembangunan Panca Budi

Oleh :

KHAIRUNNISA

NPM 1415100100

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
M E D A N
2019**



FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN

PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : KHAIRUNNISA
NPM : 1415100100
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
JENJANG : S1 (STRATA SATU)
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PERSEPSI TENTANG PEMAHAMAN
TRANSPARANSI, AKUNTABEL, EKONOMIS, EFEKTIF DAN
EFISIEN TERHADAP REALISASI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (STUDI KASUS:
ANGGARAN DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA MEDAN)

MEDAN, AGUSTUS 2019

KETUA PROGRAM STUDI

(ANGGI PRATAMA Nst, S.E., M.Si)

DEKAN



(DR. SURYA NITA, S.H., M.Hum)

PEMBIMBING I

(HERIYATI CHRISNA, S.E., M.Si)

PEMBIMBING II

(OKTARINI KHAMILAH SRG, S.E., M.Si)



FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN

SKRIPSI DITERIMA DAN DISETUJUI OLEH
PANITIA UJIAN SARJANA LENGKAP FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN

PERSETUJUAN UJIAN

NAMA : KHAIRUNNISA
NPM : 1415100100
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
TINGKAT : SI (STRATA SATU)
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PERSEPSI TENTANG PEMAHAMAN
TRANSPARANSI, AKUNTABEL, EKONOMIS, EFEKTIF DAN
EFISIEN TERHADAP REALISASI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (STUDI KASUS:
ANGGARAN DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA MEDAN)

MEDAN, AGUSTUS 2019

KETUA



ANGGOTA - I

(HERIYATI CHRISNA, S.E., MSi)

ANGGOTA - II

[Signature]

ANGGOTA - III

[Signature]

(KARTARINI KHAMLAH SRG, S.E., MSi)

(HANDRIYANI DWILITA, S.E., MSi)

ANGGOTA - IV

[Signature]
(DR. ABDUL HASYIM, Ak, MM)

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : KHAIRUNNISA
NPM : 1415100100
Fakultas/program studi : SOSIAL SAINS / AKUNTANSI
Judul Skripsi : ANALISIS PERSEPSI TENTANG PEMAHAMAN TRANSPARANSI, AKUNTABEL, EKONOMIS, EFEKTIF DAN EFISIEN TERHADAP REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (STUDI KASUS: ANGGARAN DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA MEDAN)

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain.
2. Memberi izin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada UNPAH untuk menyimpan, mengalih-media/formatkan mengelola, mendistribusikan, dan mempublikasikan karya skripsinya melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya perbuat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima sanksi apa pun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Medan, AGUSTUS 2019



(Khairunnisa)

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Khairunnisa
Tempat/Tanggal lahir : Medan, 20 April 1996
NPM : 1415100100
Fakultas : Sosial Sains
Program Studi : Akuntansi
Alamat : Jln. Pinang Baris Gg.pribadi No.85E Medan

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mengikuti ujian sarjana lengkap pada Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi.

Sehubungan dengan hal ini tersebut, maka saya tidak akan lagi ujian perbaikan nilai dimasa yang akan datang.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana.

Medan, AGUSTUS 2019
Yang membuat pernyataan



(Khairunnisa)

Menyatakan tidak ada sengketa
 dengan IPT Perpustakaan
 10 APR 2019

FM-SPAA-2012-049



Medan, 10 April 2019
 Kepada Yth: Bapak/Ibu Dekan
 Fakultas SOSIAL SAINS
 UNPAD Medan
 Di -
 Tempat

Telah di terima
 berkas persyaratan
 dapat di proses
 Medan, 10 APR 2019
 an. FM-SPAA

 TEGUH WALLYONG, S.K., M.M.

Yang hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

| | |
|---------------|------------------------------------|
| Nama | : KHAIIRUNNISA |
| Tgl. Lahir | : Medan / 20 April 1996 |
| Orang Tua | : HERMANSYAH |
| NIM | : 1415100100 |
| Prodi | : SOSIAL SAINS |
| Program Studi | : Akuntansi |
| Alamat | : 086373836930 |
| | : Jl. TB Simatupang Gg. Ashwalayah |

yang bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan judul Analisis pengukuran transparansi, akuntabel, ekonomis, efektif, dan efisien terhadap realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (studi kasus: anggaran dinas pekerjaan umum kota medan), selanjutnya saya menyatakan:

1. Melampirkan KKM yang telah disahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan
2. Tidak akan menuntut ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan indeks prestasi (IP), dan mohon diterbitkannya ijazahnya setelah lulus ujian meja hijau.
3. Telah tercapai keterangan bebas pustaka
4. Terlampir surat keterangan bebas laboratorium
5. Terlampir pas photo untuk ijazah ukuran 4x6 = 5 lembar dan 2x4 = 5 lembar Hitam Putih
6. Terlampir foto copy STTB SLIA diegalisir 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang melanjutkan ke SI lampirkan ijazah dan transkripnya sebanyak 1 lembar.
7. Terlampir pelunasan kwitansi pembayaran uang kuliah berjalan dan wisuda sebanyak 1 lembar
8. Skripsi sudah dijilid, iak 2 exemplar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan jilid kertas jeruk 5 exemplar untuk penguji (bentuk dan warna penjilidan diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang berlaku) dan lembar persetujuan sudah di landatangkan dosen pembimbing, prodi dan dekan
9. Soft Copy Skripsi disimpan di CD sebanyak 2 disc (sesuai dengan judul skripsinya)
10. Terlampir surat keterangan DKKRI (pada saat pengambilan ijazah)
11. Setelah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berkas di masukkan kedalam MAP
12. Bersedia melunaskan biaya-biaya yang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud, dengan ketentuan sbd :

| | | |
|------------------------------|--------------|----------------------|
| 1. [102] Ujian Meja Hijau | : Rp. | 600.000 |
| 2. [170] Administrasi Wisuda | : Rp. | 1.500.000 |
| 3. [202] Bebas Pustaka | : Rp. | 100.000 |
| 4. [221] Bebas LAB | : Rp. | 0 |
| Total Biaya | : Rp. | 2.200.000 |
| UK 0% | Rp. | 2.500.000 |
| | | Rp. 4.700.000 |

10/04/2019

Ukuran Toga : S



Khairunnisa
 1415100100

- 1. Surat permohonan ini sah dan berlaku bila :
 - o a. telah dicap Bukti Pelunasan dari IPT Perpustakaan UNPAD Medan.
 - o b. Melampirkan Bukti Pembayaran Uang Kuliah Aktif semester berjalan
- 2. Difasilitasi Rangkap 3 (tiga), untuk - Fakultas - untuk PPAA (asli) - Widy. As.

AN
 10 APRIL 2019

 HUFAN M. RITONGA, BA, M.Si.

Plagiarism Detector v. 1092 - Originality Report:

Analyzed document: 02/04/2019 08:49:09

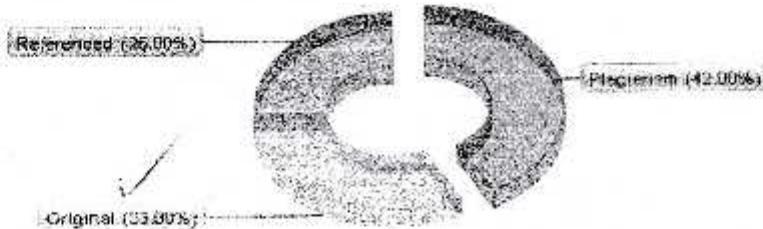
"KHAIRUNNISA_1415100100_AKUNTANSI.docx"

Licensed to: Universitas Pembangunan Panca Budi_License4



2/6/19/14-13

Relation chart:



Distribution graph:

Comparison Preset: Rewrite Detected language: Indonesian

Top sources of plagiarism:

- wrds: 4331 <https://proskituy.me/uaic/id/thesis/panca-budi/123456789/28058/chapter%203.pdf?accession=F4>
- wrds: 4503 <https://anzdoc.com/pengalaman-ditfs-kerja-pengalaman-kerja-dan-budaya-kerja-tcrba.html>
- wrds: 2823 <https://datakata.files.wordpress.com/2015/01/aapp-16.pdf>

Other Sources:]

Processed resources details:

186 - 0k / 1% - Failed

Other Sources:]

Important notes:

Wikipedia

Google Books

Ghostwriting services:

Anti-cheating:

[not detected]

[not detected]

[not detected]

[not detected]

Excluded Urls:

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI FAKULTAS EKONOMI & BISNIS

Fakultas Ekonomi UHPAB, Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4.5 Medan Fax. 061-8458177/ PO.BOX : 1099 MEDAN

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
PROGRAM STUDI MANAJEMEN
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN

(TERAKREDITASI)
(TERAKREDITASI)
(TERAKREDITASI)
(TERAKREDITASI)

PERMOHONAN MENGAJUKAN JUDUL SKRIPSI

Pertanda tangan di bawah ini :

Nama : KHAIRUNNISA
Tgl. Lahir : MEDAN / 20 April 1996
No. Mahasiswa : 1415100100
Bidang Studi : Akuntansi
Bidang : Akuntansi Sektor Publik
Kredit yang telah dicapai : 125 SKS, IPK 3.22

mengajukan judul skripsi sesuai dengan bidang ilmu, dengan judul:

| Judul Skripsi | Persetujuan |
|---|-------------------------------------|
| Analisis pengukuran transparansi, akuntabel, ekonomis, efektif, dan efisien terhadap realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (studi kasus: anggaran dinas pekerjaan umum kota medan) | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Analisis pelaksanaan sistem dan prosedur pengeluaran kas pada dinas pekerjaan umum kota medan | <input type="checkbox"/> |
| Analisis pencatatan pelaporan belanja modal pada kantor dinas pekerjaan umum kota medan | <input type="checkbox"/> |

Disetujui oleh Kepala Program Studi diberikan tanda


 (Dr. Phakri Alamsyah, M.T., Ph.D.)

Medan, 18 Oktober 2017

Pemohon,

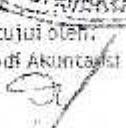

 (KHAIRUNNISA)

Nomor :
Tanggal :

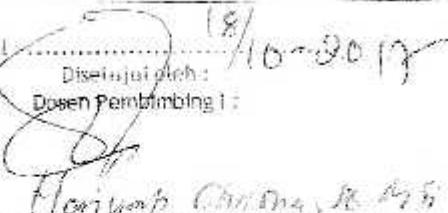

 Disetujui oleh:
 Dekan

 (Dr. Agus Sunusi, M. Si)

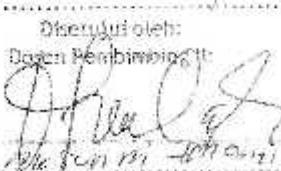
Tanggal :

Disetujui oleh:
 Ke. Profdi Akuntansi

 (Anang Pratama Natolon, SE., M. Si)

Tanggal : 18/10/2017

Disetujui oleh:
 Dosen Pembimbing I :

 (Heriyah Christina, R. M. Si)

Tanggal : 18-10-17

Disetujui oleh:
 Dosen Pembimbing II :

 (Anang Pratama Natolon, SE., M. Si)

Dokumen: FM-LPPM-08-01

Revisi: 02

Tgl. Eff: 20 Des 2015



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km 4.5 Telp. (061) 30106000 PO BOX 1099 Medan.

Email : admin_fa@unpwb.panca Budi.ac.id

<http://www.unpwb.ac.id>

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

UNIV / FIS : Universitas Pembangunan Panca Budi
 Fakultas : Sosial Sains
 Dosen Pembimbing I : Herwati Christina, S.E., M.Si
 Nama Mahasiswa : Khairunnisa
 Jurusan / Program Studi : Akuntansi Publik
 No. Stambuk / NPM : 2014 11415100100
 Jenjang Pendidikan : Strata 1
 Judul Skripsi : Analisis Dampak dan Transparansi, Akuntabilitas, Efektivitas, Efisiensi terhadap Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Studi Kasus: Anggaran Dinas Di Kabupaten

| Tanggal | Pembahasan Materi | Paraf | Keterangan |
|------------|--|-------|------------|
| 30/01-2019 | - Tambahkan hasil penelitian vs mendiskusikan pd. latar belakang - Pembaca uraian hasil pengolahan data - Pembaca penyusunan dalam Pembahasan - Tambahkan referensi | | |
| 06/02-2019 | - Pembaca abstrak - Pembaca uraian hasil penelitian - Tambahkan dan pembahasan pembantya hasil vs penelitian vs di referensi | | |
| 27/02-2019 | - Pembaca Abstrak | | |
| 29/03-2019 | Free Study nya bagian | | |

Medan,
 Diketahui / Disetujui Oleh:
 Dekan

Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.

Dosen Pembimbing I

Herwati Christina, S.E., M.Si



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jln. Jend.Gatot Subroto Km.4,5 Telp.(061) 30106060 PO.BOX.1099 Medan.

Email: adaini_fa@unpub.pancajadi.org

<http://www.pancajadi.ac.id>

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

UNIV / PTS : Universitas Pembangunan Panca Budi
 Fakultas : Sosial Sains
 Dosen Pembimbing II : Oktafani Kharimah Srg. S.E., M.Si
 Nama Mahasiswa : Khairunnisa
 Jurusan / Program Studi : Akuntansi DUBUK
 No. Stambuk / NPM : 2014 11415100100
 Jenjang Pendidikan : Strata I
 Judul Skripsi : Analisis Pengukuran Tanggungjawab Akuntabel Ekonomis, Efektif dan Efisien Terhadap Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (studi kasus : Anggaran Dinas PU Kota Medan)

| Tanggal | Pembahasan Materi | Paraf | Keterangan |
|-----------|---|-------|------------|
| 18-1-2019 | Perbaiki sistematika penulisan yg tabel waktu peneliti referensi operasional. isi penulisan di bab 4 tbg separasi dan struktur Pemerintah belum dilengkapi. | | |
| 22-1-2019 | Perbaiki sistematika penulisan skripsi yg tabel waktu penelitian, penulisan & pembahasan tahun referensi harus ditambah 10 tgn & penelitian Acc of Gilaung Mety Hidayat | | |

Medan,

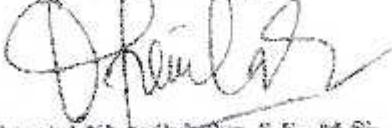
Diketahui / Disetujui Oleh :

Dekan



Dr. Surya Nita, S.P., M.Pd

Dosen Pembimbing II



Oktafani Kharimah Srg. S.E., M.Si



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jln. Jend. Gatot Subroto Km.4,5 PO.BOX.1099 Telp. (061) 8455571 Medan
 Email : fasosa@pancabudi.ac.id http://www.pancabudi.ac.id

BERITA ACARA PERUBAHAN JUDUL SKRIPSI

Dari ini, tanggal 05 Bulan Juli Tahun 2019, telah diadakan Ujian Meja Hijau Pada Program Studi Akuntansi Semester Akademik 2018 bagi mahasiswa/i atas nama :

Nama : Khairunnisa
 NIM : 14115100100
 Program Studi : Akuntansi
 Tanggal Ujian : Jumat, 05 Juli 2019
 Judul Skripsi Lama : Analisis Pengukuran transparansi, akuntansi, persepsi, efektif, dan efisien terhadap realisasi anggaran Pendidikan dan belajar daerah (Studi kasus : Anggaran di tingkat kabupaten Lumbang Kalimantan Tengah)
 Judul Skripsi Baru : Analisis Persepsi Konteng Pemahaman transparansi, akuntansi, persepsi, efektif, dan efisien terhadap realisasi anggaran Pendidikan dan belajar daerah (Studi kasus : Anggaran di tingkat kabupaten Lumbang Kalimantan Tengah)

Dinyatakan benar bahwa dalam pelaksanaan ujian Meja Hijau mahasiswa tersebut diatas telah terjadi perubahan judul skripsi yang telah dikendaki oleh Panitia Ujian Meja Hijau.

| JABATAN | NAMA DOSEN | TANDA TANGAN |
|------------------------------------|---------------------------------|--------------|
| Ketua Penguji/ Ketua Program Studi | Amri Pratomo Nt, SE., M.Si | |
| Anggota I/ Pembimbing I | Haryani Ginting, S.E., M.Si | |
| Anggota II/ Pembimbing II | Detarini Kurniasih Sy, SE, M.Si | |
| Anggota III/ Penguji I | Hanunggi Purita S.E., M.Si | |
| Anggota IV/ Penguji II | Drs Indul Khadam BS Ak. MM | |

ABSTRAK

Lembaga publik mendapat tuntutan dari masyarakat untuk dikelola secara transparan, akuntabel, ekonomis, efektif dan efisien. Transparan, akuntabel, ekonomis, efektif dan efisien tersebut diharapkan masyarakat terwujud dalam pengelolaan keuangan daerah/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Transparan, akuntabel, ekonomis, efektif dan efisien adalah azas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari pengelolaan APBD harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat sebagai kedaulatan tertinggi. Pengelolaan APBD yang baik sangat penting bagi kelangsungan dan perkembangan organisasi karena erat kaitannya dengan kelangsungan kesejahteraan masyarakat luas. Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris apakah transparansi, akuntabel, ekonomis, efektif dan efisien secara parsial berpengaruh signifikan terhadap realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan. Penelitian ini menggunakan asosiatif. Sampel dalam penelitian ini adalah 33 responden. Jenis data yaitu data primer. Metode analisis data yang digunakan adalah model regresi linier berganda, asumsi klasik, uji F, uji t dan uji determinasi dengan menggunakan *software* SPSS. Hasil dari penelitian ini, menunjukkan bahwa transparansi, akuntabel, ekonomis, efektif dan efisien secara parsial dan simultan berpengaruh signifikan terhadap realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan. Koefisien determinasi yang dalam hal ini berarti 89,1% realisasi APBD dapat diperoleh dan dijelaskan oleh transparansi, akuntabel, ekonomis, efektif dan efisien. Sedangkan sisanya 100% - 89,1% = 10,9% dijelaskan oleh faktor lain atau variabel diluar model, seperti partisipasi masyarakat, kebijakan publik, pengetahuan dewan tentang anggaran dan lain-lain.

Kata Kunci : Transparansi, Akuntabel, Ekonomis, Efektif, Efisien dan Realisasi APBD

ABSTRACT

Public institutions get demands from the public to be managed transparently, accountably, economically, effectively and efficiently. It is hoped that transparent, accountable, economical, effective and efficient will be realized in the management of regional finance / Regional Budget (APBD). Transparent, accountable, economical, effective and efficient is the principle that determines that every activity and end result of the management of the Regional Budget must be accountable to the people as the highest sovereignty. Good management of APBD is very important for the continuity and development of the organization because it is closely related to the continuity of public welfare. This study aims to prove empirically whether transparency, accountable, economical, effective and efficient partially have a significant effect on the realization of the Regional Revenue and Expenditure Budget at the Medan City Public Works Agency. This study uses associative. The sample in this study were 33 respondents. Data type is primary data. The data analysis method used is multiple linear regression models, classical assumptions, F test, t test and determination test using SPSS software. The results of this study, showed that transparency, accountable, economical, effective and efficient partially and simultaneously had a significant effect on the realization of regional income and expenditure budgets at the Medan City Public Works Agency. The coefficient of determination which in this case means 89.1% of the realization of the APBD can be obtained and explained by transparency, accountable, economical, effective and efficient. While the remaining 100% - 89.1% = 10.9% is explained by other factors or variables outside the model, such as community participation, public policy, board knowledge about the budget and others.

Keywords : Transparency, Accountable, Economical, Effective, Efficient and Realized APBD

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan berkat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Analisis Persepsi Tentang Pemahaman Transparansi, Akuntabel, Ekonomis, Efektif Dan Efisien Terhadap Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Studi Kasus: Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan)”**, yang diajukan sebagai bahan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi.

Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih atas segala dukungan, pemikiran, tenaga, materi dan juga doa dari semua pihak yang telah membantu peneliti selama menjalani masa perkuliahan dan penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Isa Indrawan S.E., M.M., selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi.
2. Ibu Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi.
3. Bapak Anggi Pratama Nst, S.E.,M.Si., selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi.
4. Ibu Heriyati Chrisna, S.E., M.Si., selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk memberi arahan dan bimbingan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

5. Ibu Oktarini Khamilah Srg, S.E., M.Si., selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan dan bimbingan mengenai ketentuan penulisan skripsi sehingga skripsi ini dapat tersusun dengan rapi dan sistematis.
6. Yang tercinta kedua orang tua penulis yakni Ayahanda Hermansyah dan Ibunda Elida Hanum yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materil kepada penulis.
7. Kepada keluarga penulis yakni Ramlah (Nenek), Zulham Koto (Om), Yetti Bachtiar (Tante), Ely Arma (kakak mama), Yen (Uwo), Sya'ban (Bapak), Sri Sulistia Utami (Ibu), Satria Jaka Pratama (Orang spesial) yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materil kepada penulis.
8. Kepada teman-temanku Ganda Wicaksono (Abangan) dan masih banyak lagi yang belum saya sebutkan. Terima kasih atas dorongan semangat dan kebersamaan yang tidak terlupakan.
9. Kepada teman-teman terdekatku di kampus yaitu Putri Triani Sitompul (sahabat seperjuangan), Tommy Chrystian P (sahabat dikampus), Wan Luthfiyah Rahmal (Adik Kelas Terbaik Dikampus) dan masih banyak lagi yang belum saya sebutkan. Terima kasih atas dorongan semangat dan kebersamaan yang tidak terlupakan.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini yang disebabkan keterbatasan pengetahuan dan pengalaman. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca. Terimakasih.

Medan, Januari 2019
Penulis

Khairunnisa
1415100100

DAFTAR ISI

Halaman

| | |
|---|-------------|
| HALAMAN JUDUL | |
| HALAMAN PENGESAHAN | ii |
| HALAMAN PERSETUJUAN | iii |
| HALAMAN PERNYATAAN | iv |
| ABSTRAK | vi |
| ABSTRACT | vii |
| KATA PENGANTAR | viii |
| DAFTAR ISI | x |
| DAFTAR TABEL | xii |
| DAFTAR GAMBAR | xiv |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Identifikasi dan Batasan Masalah | 5 |
| C. Rumusan Masalah | 6 |
| D. Tujuan dan Manfaat Penelitian | 6 |
| E. Keaslian Penelitian..... | 8 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | |
| A. Landasan Teori..... | 9 |
| 1. Konsep Keuangan Daerah..... | 9 |
| 2. Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang | 12 |
| 3. <i>Good Governance</i> (Kepemerintahan yang Baik)..... | 13 |
| 4. Transparansi | 15 |
| 5. Akuntabilitas | 16 |
| 6. <i>Value for Money</i> | 18 |
| B. Penelitian Sebelumnya..... | 21 |
| C. Kerangka Konseptual | 23 |
| D. Hipotesis | 25 |
| BAB III METODE PENELITIAN | |
| A. Pendekatan Penelitian | 26 |
| B. Lokasi dan Waktu Penelitian | 26 |
| C. Definisi Operasional Variabel..... | 27 |
| D. Populasi dan Sampel/Jenis dan Sumber Data | 28 |
| E. Teknik Pengumpulan Data..... | 29 |
| F. Teknik Analisis Data..... | 31 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | |
| A. Hasil Penelitian | 36 |
| 1. Deskripsi Objek Penelitian | 36 |
| 2. Penyajian Data | 39 |
| 3. Uji Kualitas Data..... | 52 |

| | |
|--|----|
| 4. Pengujian Asumsi Klasik..... | 57 |
| 5. Pengujian Hipotesis | 62 |
| B. Pembahasan..... | 66 |
| 1. Pengaruh Transparansi Terhadap Realisasi APBD..... | 66 |
| 2. Pengaruh Akuntabel Terhadap Realisasi APBD..... | 67 |
| 3. Pengaruh Ekonomis Terhadap Realisasi APBD | 67 |
| 4. Pengaruh Efektif Terhadap Realisasi APBD | 68 |
| 5. Pengaruh Efisien Terhadap Realisasi APBD | 69 |
| 6. Pengaruh Transparansi, Akuntabel, Ekonomis, Efektif Dan Efisien Secara Simultan Terhadap Realisasi APBD | 69 |
| BAB V KESIMPULAN DAN SARAN | |
| A. Kesimpulan | 71 |
| B. Saran | 71 |
| DAFTAR PUSTAKA | |
| LAMPIRAN | |
| BIODATA | |

DAFTAR TABEL

| | Halaman |
|--|----------------|
| Tabel 2.1 Daftar Penelitian Sebelumnya..... | 21 |
| Tabel 3.1 Skedul Proses Penelitian | 26 |
| Tabel 3.2 Operasionalisasi Variabel | 27 |
| Tabel 3.3 Skor Pendapat Responden..... | 30 |
| Tabel 4.1 Pernyataan $X_{1.1}$ | 40 |
| Tabel 4.2 Pernyataan $X_{1.2}$ | 40 |
| Tabel 4.3 Pernyataan $X_{1.3}$ | 41 |
| Tabel 4.4 Pernyataan $X_{1.4}$ | 41 |
| Tabel 4.5 Pernyataan $X_{1.5}$ | 42 |
| Tabel 4.6 Pernyataan $X_{2.1}$ | 42 |
| Tabel 4.7 Pernyataan $X_{2.2}$ | 43 |
| Tabel 4.8 Pernyataan $X_{2.3}$ | 43 |
| Tabel 4.9 Pernyataan $X_{2.4}$ | 44 |
| Tabel 4.10 Pernyataan $X_{2.5}$ | 45 |
| Tabel 4.11 Pernyataan $X_{3.1}$ | 45 |
| Tabel 4.12 Pernyataan $X_{3.2}$ | 46 |
| Tabel 4.13 Pernyataan $X_{3.3}$ | 46 |
| Tabel 4.14 Pernyataan $X_{4.1}$ | 47 |
| Tabel 4.15 Pernyataan $X_{4.2}$ | 48 |
| Tabel 4.16 Pernyataan $X_{4.3}$ | 48 |
| Tabel 4.17 Pernyataan $X_{5.1}$ | 49 |
| Tabel 4.18 Pernyataan $X_{5.2}$ | 49 |
| Tabel 4.19 Pernyataan $X_{5.3}$ | 50 |
| Tabel 4.20 Pernyataan Y.1 | 50 |
| Tabel 4.21 Pernyataan Y.2..... | 51 |
| Tabel 4.22 Pernyataan Y.3 | 52 |
| Tabel 4.23 Uji Validitas X_1 (Transparansi)..... | 52 |
| Tabel 4.24 Uji Validitas X_2 (Akuntabel) | 53 |
| Tabel 4.25 Uji Validitas X_3 (Ekonomis)..... | 53 |
| Tabel 4.26 Uji Validitas X_4 (Efektif)..... | 54 |

| | |
|---|----|
| Tabel 4.27 Uji Validitas X ₅ (Efisien)..... | 54 |
| Tabel 4.28 Uji Validitas Y (Realisasi APBD) | 55 |
| Tabel 4.29 Uji Reliabilitas X ₁ (Transparansi)..... | 55 |
| Tabel 4.30 Uji Reliabilitas X ₂ (Akuntabel)..... | 56 |
| Tabel 4.31 Uji Reliabilitas X ₃ (Ekonomis) | 56 |
| Tabel 4.32 Uji Reliabilitas X ₄ (Efektif) | 56 |
| Tabel 4.33 Uji Reliabilitas X ₅ (Efisien)..... | 57 |
| Tabel 4.34 Uji Reliabilitas Y (Realisasi APBD)..... | 57 |
| Tabel 4.35 Uji Normalitas <i>One Sample Kolmogorov Smirnov Test</i> | 59 |
| Tabel 4.36 Uji Multikolinearitas | 60 |
| Tabel 4.37 Regresi Linier Berganda | 62 |
| Tabel 4.38 Uji Parsial..... | 63 |
| Tabel 4.39 Uji Simultan | 65 |
| Tabel 4.40 Koefisien Determinasi..... | 66 |

DAFTAR GAMBAR

| | Halaman |
|---|----------------|
| Gambar 2.1 Kerangka Konseptual..... | 25 |
| Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pekerjaan Umum Kota Medan..... | 39 |
| Gambar 4.2 Histogram Uji Normalitas..... | 58 |
| Gambar 4.3 PP Plot Uji Normalitas..... | 58 |
| Gambar 4.4 <i>Scatterplot</i> Uji Heteroskedastisitas..... | 61 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Akuntansi sektor publik adalah sistem akuntansi yang dipakai oleh lembaga lembaga publik sebagai salah satu pertanggungjawaban kepada publik. Sekarang terdapat perhatian yang semakin besar terhadap praktek akuntansi yang dilakukan oleh lembaga lembaga publik, baik akuntansi sektor pemerintahan maupun lembaga publik nonpemerintah. Lembaga publik mendapat tuntutan dari masyarakat untuk dikelola secara transparan, akuntabel, ekonomis, efektif dan efisien. Transparan, akuntabel, ekonomis, efektif dan efisien tersebut diharapkan masyarakat terwujud dalam pengelolaan keuangan daerah/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Transparan, akuntabel, ekonomis, efektif dan efisien adalah azas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari pengelolaan APBD harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat sebagai kedaulatan tertinggi. Ciri utama dalam pengelolaan APBD adalah Transparan, akuntabel, ekonomis, efektif dan efisien. Salah satu elemen penting dalam rangka perwujudan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) adalah adanya pengelolaan APBD yang baik (*Good Financial Governance*). Pengawasan APBD diperlukan untuk mengetahui apakah perencanaan yang telah disusun dapat berjalan secara efisien, efektif dan ekonomis.

Menurut Halim (2013), "Pengelolaan APBD yang baik sangat penting bagi kelangsungan dan perkembangan organisasi karena erat kaitannya dengan

kelangsungan kesejahteraan masyarakat luas. Pengelolaan APBD yang baik merupakan penerapan prinsip *Value for Money* (VfM) dan mutlak dilakukan. Implementasi prinsip *value for money* diyakini dapat memperbaiki kinerja sektor publik. *Value for Money* merupakan prinsip pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasar pada tiga elemen utama, yaitu : ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. *Value for Money* dapat tercapai apabila organisasi telah menggunakan biaya input paling kecil untuk mencapai output yang optimum dalam rangka mencapai tujuan organisasi”.

Fenomena yang ada di Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan yaitu anggaran sudah diperbesar, kinerja dinas PU medan masih belum sesuai dengan harapan. Kinerja Dinas PU kota Medan kurang maksimal melakukan pengawasan pelaksanaan proyek drainase dan gorong gorong yang ada di Medan. Sehingga, banyak pengerjaan dilaksanakan tidak tepat guna. Setiap ada pengerjaan proyek drainase harus ditangani konsultan maupun tenaga ahli. Pelaksana proyek pun akan menyesuaikan bentuk dan kultur tanah serta kemiringan parit sehingga air mengalir dengan lancar. "Tentu pengawasan dari PU harus maksimal dan kordinasi dengan semua pihak. Sehingga pengerjaan dapat terselesaikan bukan menimbulkan masalah baru (<http://www.rmolsumut.com>). Hasil Penelitian Oktasari (2016), Saridewi (2015) dan Mukarif (2013), menunjukkan bahwa “kebijakan publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah”.

Fenomena yang dapat diamati dalam pengelolaan APBD saat ini adalah menguatnya tuntutan pelaksanaan akuntabilitas publik dan transparansi publik oleh organisasi sektor publik seperti unit-unit kerja pemerintah baik pusat maupun

daerah. Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkap segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Sedangkan transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas, seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu diakses pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau. Hasil Penelitian Oktasari (2016), menunjukkan bahwa “akuntabilitas publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah”.

Fenomena pengelolaan APBD ini terlihat bahwa informasi penyelenggaraan pemerintahan terkait dengan pengelolaan APBD secara terbuka cepat dan tepat kepada masyarakat belum didapatkan masyarakat, publik tidak mendapatkan pelayanan yang memuaskan, masyarakat tidak dilibatkan dalam proses pembangunan dan pemerintahan. Semua badan publik tidak memberikan disposisi secara tertulis soal dokumen rencana kerja atau rencana anggaran pada dinas pekerjaan umum Kota Medan. Tidak mengumumkan hasil audit BPK setiap tahunnya. Hasil Penelitian Oktasari (2016), menunjukkan bahwa “transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah”.

Fenomena sehubungan dengan pelaksanaan akuntabilitas, transparansi, pengawasan, standar akuntansi pemerintah, dan pengelolaan APBD dimana pelaksanaan anggaran dan tahap pelaporan pelaksanaan anggaran publik tidak mendapat akses (akuntabilitas rendah), pelaksanaan anggaran yang buruk, pemborosan anggaran atau anggaran yang tidak hemat, kelambatan melaporkan

keuangan serta tidak sesuai dengan standar akuntansi pemerintah, hal ini terlihat dari hasil pemeriksaan laporan pertanggungjawaban keuangan dinas pekerjaan umum Kota Medan beberapa periode terakhir ini oleh BPK. Hal ini terlihat pada pengelolaan APBD pada pekerjaan umum dilakukan sangat boros, tidak sesuai dengan kebutuhan publik dan menguntungkan kelompok tertentu. Hasil Penelitian Saridewi (2015), menunjukkan bahwa “akuntabel, ekonomis, efektif dan efisien berpengaruh positif dan signifikan terhadap realisasi APBD”.

Dinas pekerjaan umum merupakan bagian dari sektor publik yang selalu disoroti karena pengelolaan inefisiensi, kebocoran dana, pemborosan dan selalu merugi. Tuntutan baru agar dinas pekerjaan umum meningkatkan pelayanan melalui perwujudan *value for money* dalam menjalankan atau melaksanakan kegiatannya. *Value for money* merupakan konsep pengelolaan pelayanan umum yang mendasarkan pada tiga elemen utama yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Pengelolaan anggaran dikaitkan dengan *value for money* masih banyaknya anggaran belum dilakukan secara ekonomi (biaya yang tinggi hasil minim, anggaran digunakan tidak didasarkan pada kebutuhan/skala prioritas, penggunaan anggaran yang boros). Dinas pekerjaan umum seharusnya bisa memperbaiki sejumlah hal yang menjadi penyebab bahwa pelaksanaan pengelolaan anggaran tidak didasarkan pada *value for money*.

Berdasarkan uraian di atas, maka ditetapkan judul penelitian sebagai berikut:
“Analisis Persepsi Tentang Pemahaman Transparansi, Akuntabel, Ekonomis, Efektif Dan Efisien Terhadap Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Studi Kasus: Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan)”

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Adapun identifikasi masalah yang akan dibahas penulis adalah:

- a. Anggaran sudah diperbesar, kinerja dinas PU medan masih belum sesuai dengan harapan. Kinerja Dinas PU kota Medan kurang maksimal melakukan pengawasan pelaksanaan proyek drainase dan gorong gorong yang ada di Medan, sehingga banyak pengerjaan dilaksanakan tidak tepat guna.
- b. Pelaksanaan anggaran dan tahap pelaporan pelaksanaan anggaran publik tidak mendapat akses (akuntabilitas rendah), pelaksanaan anggaran yang buruk, pemborosan anggaran atau anggaran yang tidak hemat.
- c. Terindikasi bahwa informasi penyelenggaraan pemerintahan terkait dengan pengelolaan APBD secara terbuka cepat dan tepat kepada masyarakat belum didapatkan masyarakat, publik tidak mendapatkan pelayanan yang memuaskan, masyarakat tidak dilibatkan dalam proses pembangunan dan pemerintahan.
- d. Pengelolaan anggaran dikaitkan dengan *value for money* masih banyaknya anggaran belum dilakukan secara ekonomi (biaya yang tinggi hasil minim, anggaran digunakan tidak didasarkan pada kebutuhan/skala prioritas).

2. Batasan Masalah

Mengingat masalah yang akan dihadapi maka agar penelitian ini lebih terarah dan pembahasannya tidak menyimpang maka penulis membatasi pembahasan pada pemahaman transparansi, akuntabel, ekonomis, efektif dan

efisien terhadap realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (studi kasus: anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan) pada tahun 2018.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka peneliti merumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Apakah transparansi, akuntabel, ekonomis, efektif dan efisien secara parsial berpengaruh signifikan terhadap realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan?
2. Apakah transparansi, akuntabel, ekonomis, efektif dan efisien secara simultan berpengaruh signifikan terhadap realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut :

- a. Untuk membuktikan secara empiris apakah transparansi, akuntabel, ekonomis, efektif dan efisien secara parsial berpengaruh signifikan terhadap realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan.
- b. Untuk membuktikan secara empiris apakah transparansi, akuntabel, ekonomis, efektif dan efisien secara simultan berpengaruh signifikan

terhadap realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan.

2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pikiran dan manfaat yang berarti yaitu:

a. Bagi Peneliti

Bagi Peneliti, penelitian ini memberikan kontribusi keilmuan terutama dalam menambah ilmu pengetahuan dan mengembangkan wawasan tentang analisis transparansi, akuntabel, ekonomis, efektif dan efisien terhadap realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

b. Bagi Pemerintah Daerah

Bagi pemerintah daerah, penelitian ini sebagai bahan pertimbangan dalam memperhatikan analisis transparansi, akuntabel, ekonomis, efektif dan efisien terhadap realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

c. Bagi Peneliti Berikutnya

Bagi peneliti berikutnya, penelitian ini dapat menjadi bahan literatur untuk pengembangan penelitian selanjutnya tentang sektor publik,

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Oktasari (2016), dengan judul “Pengaruh Akuntabilitas Publik, Partisipasi Masyarakat, Transparansi Kebijakan Publik, Dan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) di DPRD Kabupaten Karanganyar”. Penelitian ini berjudul analisis persepsi tentang pemahaman transparansi, akuntabel, ekonomis,

efektif dan efisien terhadap realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (studi kasus: anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan).

Penelitian ini memiliki perbedaaan dengan penelitian sebelumnya yang terletak pada:

1. Variabel Penelitian: penelitian terdahulu menggunakan 4 (empat) variabel bebas yaitu akuntabilitas publik, partisipasi masyarakat, transparansi kebijakan publik, dan pengetahuan dewan tentang anggaran, serta 1 (satu) variabel terikat yaitu pengawasan keuangan daerah (APBD). Sedangkan penelitian ini menggunakan 5 (lima) variabel bebas yaitu transparansi, akuntabel, ekonomis, efektif dan efisien, serta 1 (satu) variabel terikat yaitu: realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah.
2. Jumlah Observasi/data (n): peneliti terdahulu menggunakan sampel sebanyak 45 responden. Sedangkan penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 33 responden.
3. Waktu Penelitian: penelitian terdahulu dilakukan tahun 2016 sedangkan penelitian ini tahun 2019.
4. Lokasi Penelitian: lokasi penelitian terdahulu pada DPRD Kabupaten Karanganyar, sedangkan penelitian ini dilakukan pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Konsep Keuangan Daerah

a. Pengertian Keuangan Daerah

Istilah keuangan daerah tidak terlepas dan selalu terkait dengan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) karena keuangan daerah tersebut telah ditetapkan dalam APBD. Pengertian keuangan daerah menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 58 Tahun 2005, tentang “Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dan tentunya dalam batas-batas kewenangan daerah”.

Keuangan daerah dituangkan sepenuhnya kedalam APBD. APBD menurut peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.58 Tahun 2005 Tentang pengelolaan keuangan daerah yaitu “anggaran pendapatan dan belanja daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan ditetapkan dengan peraturan daerah (Noordiawan, 2008).

Selanjutnya pengelolaan keuangan daerah merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,

pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Dalam konteks ini pengelolaan keuangan daerah difokuskan kepada pengelolaan APBD sebagai wujud perencanaan oleh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yaitu entitas penyusun/pengguna APBD untuk pelayanan publik”.

b. Fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Dalam arti luas, anggaran daerah atau anggaran sektor publik memiliki beberapa fungsi yaitu sebagai : (1) instrument politik, (2) instrument kebijakan fiscal, (3) instrument perencanaan dan (4) instrument pengendalian (Halim 2013). Sedangkan menurut Noordiawan (2008) “anggaran sektor publik mempunyai beberapa fungsi utama, yaitu : (1) sebagai alat perencanaan, (2) alat pengendalian (3) alat kebijakan fiscal, (4) alat politik, (5) alat koordinasi dan komunikasi, (6) alat penilaian kinerja, (7) alat motivasi dan alat menciptakan ruang publik”. Mardiasmo (2011) “memberikan fungsi anggaran dengan hal yang sama dengan Noordiawan (2008) dengan kawan-kawan”.

Menurut Renyowijoyo (2008) “fungsi anggaran adalah (1) sebagai pedoman pemerintah dalam mengelola Negara dalam periode mendatang, (2) alat pengawas bagi masyarakat terhadap kebijaksanaan pemerintah, (3) alat pengawasan terhadap kemampuan pelaksanaan kebijaksanaan pemerintah.

Dari berbagai pendapat para ahli tersebut diatas bahwa anggaran berfungsi sebagai perencanaan, pengendalian, kebijakan, alat politik dan penetapan tentang apa yang akan dilakukan pada periode tahun berikutnya yang berpengaruh penting dalam akuntansi dan pelaporan keuangan”.

c. Norma Umum Anggaran Sektor Publik

Agar strategi yang telah ditetapkan dapat dicapai, maka pemerintah daerah perlu untuk tetap memiliki komitmen bahwa anggaran daerah adalah perwujudan amanat rakyat kepada pihak eksekutif dan legislatif, dalam rangka mencapai peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu anggaran sektor publik atau anggaran daerah harus mengacu pada prinsip-prinsip berikut (Halim 2013): “(1) keadilan anggaran, (2) efisiensi dan efektifitas anggaran (3) anggaran berimbang dan deficit, (4) disiplin anggaran, (5) transparansi dan akuntabilitas anggaran”.

d. Siklus/Daur Anggaran

Dalam Undang-Undang No. 17/2003 ditetapkan bahwa “APBN merupakan wujud pengelolaan keuangan Negara yang ditetapkan tiap tahun dengan undang-undang, terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja dan pembiayaan. Pendapatan Negara terdiri atas penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak, dan hibah, sedangkan belanja Negara dipergunakan untuk keperluan tugas pemerintah pusat dan daerah, yang diperinci menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja. Pembiayaan diterima dari surplus tahun lalu dan cadangan, serta digunakan untuk membayar defisit anggaran tahun lalu, membayar hutang, dan pembentukan dana cadangan”.

“Daur anggaran merupakan suatu proses anggaran yang terus menerus, dimulai penyusunan anggaran sampai pada pengesahan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran oleh DPR. Daur anggaran pemerintah RI dikelompokkan dalam 5 tahap (Renyowijoyo, 2008):

- 1) Penyusunan dan pengajuan RUU-APBN dan penetapan UU-APBN oleh DPR.

- 2) Pembahasan dan pengesahan RUU- APBN dan penetapan UU- APBN oleh DPR.
- 3) Pelaksanaan anggaran, akuntansi dan pelaporan keuangan Negara oleh Pemerintah.
- 4) Pemeriksaan pelaksanaan anggaran, akuntansi dan laporan keuangan oleh BPK.
- 5) Pembahasan dan persetujuan Laporan pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN dan penetapan UU-Laporan Pertanggungjawaban APBN oleh DPR”.

Mardiasmo (2011 : 70) “Prinsip-prinsip pokok siklus anggaran perlu diketahui dengan baik oleh penyelenggara pemerintahan. Pada dasarnya prinsip-prinsip dan mekanisme penganggaran relatif tidak berbeda antara sektor swasta dengan sektor publik”. Mardiasmo (2011) “Siklus anggaran meliputi empat tahap yang terdiri atas : (1) Tahap persiapan anggaran (*preparation*), (2) Tahap ratifikasi (*ratification*), (3) Tahap implementasi (*implementation*) dan (4) Tahap pelaporan dan evaluasi (*reporting and evaluation*)”.

2. Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang

Menurut Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 bagian ke empat pasal 10, bagian ke lima pasal 11, bagian keenam pasal 12, bagian ketujuh pasal 13, dan bagian kedelapan pasal 14 bahwa “Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang terdiri dari : (1) Kepala SKPD (2). Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang (3) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan SKPD (4) Pejabat Penatausahaan Keuangan

SKPD (5) Bendahara Penerima dan Bendahara Pengeluaran. Masing – masing pejabat pengelola anggaran/pengguna barang tersebut mempunyai tugas dan tanggung jawab yang berbeda-beda”.

3. *Good Governance* (Kepemerintahan yang Baik)

Pengertian *good governance* dapat diartikan sebagai cara mengelola urusan-urusan publik. *Good governance* dapat tercapai apabila beberapa hal dibawah ini dipedomani dalam pengelolaan APBD. Selanjutnya Mardiasmo (2011) “mengemukakan elemen manajemen keuangan daerah yang diperlukan untuk mengontrol kebijakan keuangan daerah tersebut meliputi, akuntabilitas, value for money, kejujuran, transparansi dan pengawasan”.

Konsep *Good Governance*, *Good Financial Governance* merupakan konsep baru yang di adopsi dari luar diperkenalkan di Indonesia oleh lembaga-lembaga donor World Bank, Asian Development Bank (ADB) dan United Nation Development Program (UNDP). *Good Governance* sebagai suatu kesuksesan pemerintah dalam mengelola keuangan untuk pelayanan umum yang baik.

World Bank dalam Maryono (2007) “mengusung tiga indikator yang perlu diperhatikan dalam *good governance* yaitu : (1) bentuk rejim politik, (2) proses dimana kekuasaan digunakan dalam manajemen-manajemen sumber daya social dan ekonomi bagi kepentingan pembangunan, (3) kemampuan pemerintah untuk mendesain, memformulasikan, melaksanakan kebijakan, dan melaksanakan fungsi-fungsinya”.

ADB mengartikulasikan empat elemen penting dari *good governance* yaitu: (1) akuntabilitas, (2) partisipasi, (3) terprediksi, (4) transparansi. UNDP

menyebutkan enam indikator kesuksesan *good governance* yaitu: (1) mengikut sertakan semua, (2) transparan dan bertanggung jawab, (3) efektif dan adil (4) menjamin adanya supremasi hukum, (5) menjamin bahwa prioritas-prioritas politik, sosial ekonomi didasarkan pada konsensus masyarakat, (6) memperhatikan kepentingan mereka yang paling miskin dan lemah dalam proses pengambilan keputusan menyangkut alokasi sumber daya pembangunan.

Maryono (2007) “mengatakan terdapat lima prinsip dasar dalam mengelola keuangan publik yaitu (1) transparansi, (2) efisien, (3) efektif, (4) akuntabilitas, (5) partisipasi”.

World Bank dalam Mardiasmo (2011), “menetapkan prinsip-prinsip pokok dalam penganggaran dan manajemen keuangan daerah antara lain : (1) Komprehensif dan disiplin, (2) fleksibilitas, (3) terprediksi, (4) kejujuran (5) informasi, (6) Transparansi dan akuntabilitas. ADB memberikan indikator ataupun prinsip-prinsip *good financial governance* yaitu : (1) *transparansi of financial reporting*, (2) *Reliability of financial reporting*, (3) *accounting and auditing standards*, (4) *strength of the accounting and auditing profesional*, (5) *legal and regulatory framework*”.

Karakteristik *Good Governace* menurut UNDP dalam Mardiasmo (2011), “(1) *participation*, (2) *rule of law*, (3) *transparency*, (4) *responsiveness*, (5) *consensus orientation*, (6) *equity*, (7) *efficiency and effectiveness*, (8) *Accountability*, (9) *strategic vision*”.

Dari berbagai elemen manajemen keuangan daerah dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas, transparansi, pengawasan dan akuntansi diperlukan untuk

mengontrol kebijakan keuangan daerah tersebut. Pencapaian *good governance*, *good financial governance* juga tidak terlepas dari hal tersebut diatas.

4. Transparansi

Selain adanya akuntabilitas dalam siklus anggaran, transparansi anggaran juga diperlukan untuk meningkatkan pengawasan. Transparansi merupakan salah satu prinsip *good governance*. Mardiasmo (2011) “Transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas, seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat di mengerti dan dipantau”.

Transparansi bermakna tersedianya informasi yang cukup, akurat dan tepat waktu tentang kebijakan publik, dan proses pembentukannya. Informasi adalah suatu kebutuhan penting masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan daerah. Dengan ketersediaan informasi, masyarakat dapat ikut sekaligus mengawasi sehingga kebijakan publik yang muncul bisa memberikan hasil yang optimal bagi masyarakat, serta mencegah terjadinya kecurangan dan manipulasi yang hanya akan menguntungkan salah satu kelompok masyarakat saja secara tidak proporsional.

Menurut Sopamah (2009), “anggaran yang disusun oleh pihak eksekutif dikatakan transparansi jika memenuhi kriteria berikut (1) Terdapat pengumuman kebijakan anggaran, (2) Tersedia dokumen anggaran dan mudah diakses, (3) Tersedia laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu (4) Terakomodasinya suara/usulan rakyat (4) Terdapat system pemberian informasi kepada publik”.

Menurut Sumarsono (2009) Transparansi adalah “keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan keuangan daerah, sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD dan masyarakat. Transparansi pengelolaan keuangan daerah pada akhirnya akan menciptakan *horizontal accountability* antara pemerintah daerah dengan masyarakatnya, sehingga tercipta Pemerintah Daerah yang bersih, efektif, efisien, akuntabel dan responsip terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat”.

Menurut Mursyidi (2009) Transparansi adalah “memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang undangan. Dengan demikian dapat dikatakan transparansi merupakan yang tidak terpisah dalam pencapaian pengelolaan keuangan pemerintah dan pemerintahan yang baik”.

5. Akuntabilitas

Secara umum dalam setiap pengelolaan APBD selalu di kaitkan dengan akuntabilitas publik. Hal ini dapat dilihat dari defenisi akuntabilitas yang merupakan hal yang penting untuk menjamin efisiensi dan efektivitas. Keterkaitan atau pentingnya akuntabilitas dalam pengelolaan APBD dapat dilihat bahwa akuntabilitas dengan seberapa baik prosedur hukum yang diikuti untuk membentuk keputusan administrasi publik yang harus dihormati oleh para pegawai sipil dan otoritas publik. Akuntabilitas mencakup eksistensi dari suatu

mekanisme yang meyakinkan politisi dan pejabat pemerintahan terhadap aksi perbuatannya dalam penggunaan sumber-sumber publik dan kinerja prilakunya. Akuntabilitas juga berkaitan erat dengan pertanggungjawaban terhadap efektivitas kegiatan dalam pencapaian sasaran atau target kebijaksanaan atau program.

Mardiasmo (2011) Akuntabilitas publik adalah “kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut”.

Mardiasmo (2011) “menjelaskan terdapat empat dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik, yaitu (1) Akuntabilitas kejujuran dan hukum (*Accountability for probity and legality*), (2) Akuntabilitas proses (*process accountability*), (3) Akuntabilitas program (*program accountability*) (4) Akuntabilitas kebijakan (*policy accountability*)”.

Menurut Sulistoni (2013) “pemerintah yang accountabel memiliki ciri ciri sebagai berikut (1) Mampu menyajikan informasi penyelenggaraan secara terbuka, cepat, tepat kepada masyarakat, (2) Mampu memberikan pelayanan yang memuaskan bagi publik, (3) Mampu memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan dan pemerintahan, (4) Mampu menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan publik secara proporsional, dan (5) Adanya sarana bagi publik untuk menilai kinerja pemerintah. Melalui pertanggung jawaban publik, masyarakat dapat menilai derajat pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah”.

Akuntabilitas pengelolaan APBD adalah kewajiban Pemerintah Daerah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang terkait dengan penerimaan dan penggunaan uang publik kepada pihak yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (DPRD dan masyarakat). Aspek penting yang harus dipertimbangkan ialah (1) Legalitas penerimaan dan pengeluaran daerah. Setiap transaksi yang dilakukan harus dapat dilacak otoritas legalnya (2) Pengelolaan (*stewardship*) keuangan daerah secara baik, perlindungan asset fisik dan financial, mencegah terjadinya pemborosan dan salah urus. Prinsip prinsip keuangan daerah meliputi (1) Adanya suatu sistem akuntansi dan system anggaran yang dapat menjamin bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku (2) Pengeluaran daerah yang dilakukan berorientasi pada pencapaian visi, misi, tujuan sasaran dan hasil (manfaat) yang akan dicapai. Mursyidi (2009) “Akuntabilitas. Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik”.

6. *Value for Money*

Tuntutan baru (transparansi dan akuntabilitas) dalam organisasi sektor publik harus memperhatikan *value for money* (VfM) dalam menjalankan aktivitasnya. Renyowijoyo (2008) “menyatakan *Value for Money* merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga jenis elemen utama yaitu, ekonomi, efisiensi, dan efektivitas”.

Menurut Renyowijoyo (2008), “ekonomi merupakan perolehan masukan (input) dengan kualitas dan kuantitas tertentu dengan harga terendah. Ekonomi merupakan perbandingan antara masukan (yang terjadi) dengan nilai masukan (yang seharusnya). Ekonomi terkait dengan sejauh mana organisasi sektor publik dapat meminimalisir sumber daya yang digunakan, dengan menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif”.

Renyowijoyo (2008), “efisiensi merupakan pencapaian keluaran (output) yang maksimum dengan masukan tertentu dengan penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu. Efisiensi merupakan perbandingan keluaran/masukan (output/input) yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan”.

Renyowijoyo (2008), “efektifitas merupakan tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Secara sederhana efektifitas merupakan perbandingan outcome dengan output. Ketiga hal tersebut merupakan elemen pokok *value for money*, sedang tambahannya dua elemen lain yaitu keadilan (*equity*) dan pemerataan atau kesetaraan (*equality*). Keadilan mengacu pada adanya kesempatan social (*social opportunity*) yang sama untuk mendapatkan pelayanan public yang berkualitas dan kesejahteraan ekonomi. Selain keadilan perlu dilakukan distribusi secara merata (*equality*). Penggunaan dana publik hendaknya tidak hanya terkonsentrasi pada kelompok tertentu saja, melainkan dilakukan secara merata”.

Kinerja anggaran pada dasarnya adalah system penyusunan dan pengelolaan anggaran daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja. Kinerja tersebut harus dapat memanfaatkan uang sebaik mungkin dengan konsep *value for*

money yang berorientasi kepada kepentingan publik. Hal ini berarti dalam pengelolaan keuangan daerah tersebut harus mencerminkan tiga pilar utama yaitu ekonomis, efisien, efektifitas. (1) Ekonomis, merupakan ukuran penggunaan dana masyarakat sesuai kebutuhan sesungguhnya (2) Efisien, merupakan ukuran penggunaan dana masyarakat (*public money*) yang dapat menghasilkan output maksimal (berdaya guna). (3) Efektifitas, merupakan ukuran seberapa jauh tingkat out put, kebijakan dan prosedur dapat mencapai tujuan kepentingan publik.

Peran pemerintah daerah tidak lagi merupakan alat kepentingan pemerintah pusat, melainkan alat untuk memperjuangkan aspirasi dan kepentingan daerah. Konsep *value for money* (VFM) ini penting bagi pemerintah daerah sebagai pelayan masyarakat, karena implementasinya akan memberikan manfaat seperti : (1) Efektifitas pelayan public, dalam arti pelayanan yang diberikan tepat sasaran (2) Meningkatkan mutu pelayanan public (3) Biaya pelayanan yang murah, karena hilangnya efisiensi dan penghematan dalam penggunaan *resources* (4) Alokasi belanja yang lebih berorientasi pada kepentingan publik (5) Meningkatkan *public cost awareness* sebagai akar pelaksanaan pertanggungjawaban publik.

Sektor publik sering dinilai sebagai sarang inefisiensi, pemborosan, sumber kebocoran dana dan institusi yang selalu merugi. Tuntutan baru muncul agar organisasi sektor public memperhatikan *Value for money* dalam menjalankan aktivitasnya. Ulum (2009) "Pembahasan *value for money* menyangkut apa yang dikenal dengan 3E".

Ekonomi adalah praktik pembelian barang dan jasa dengan tingkat kualitas tertentu pada harga terbaik yang dimungkinkan (*spending less*). Pengertian ekonomi (hemat/tepat guna) sering disebut kehematan yang mencakup juga

pengelolaan secara hati-hati atau cermat (*prudence*) dan tidak ada pemborosan. Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan menggunakan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya (*spending well*).

Efektivitas pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan (hasil guna). Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (*spending wisely*). Dari uraian diatas, jelaslah bahwa ketiga pokok bahasan *value for money* sangat terkait satu dengan yang lain. Dalam konteks otonomi daerah *value for money* merupakan jembatan untuk mengantar pemerintah daerah mencapai *good governance*, yaitu pemerintah daerah yang transparan, ekonomis, efisien, efektif, responsip dan akuntabel.

B. Penelitian Sebelumnya

Adapun penelitian terdahulu dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.1 Daftar Penelitian Sebelumnya

| No | Nama /Tahun | Judul | Variabel X | Variabel Y | Model Analisis | Hasil penelitian |
|----|-----------------|--|--|--------------------------------|----------------------------------|--|
| 1 | Oktasari (2016) | Pengaruh Akuntabilitas Publik, Partisipasi Masyarakat, Transparansi Kebijakan Publik, Dan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) di | Akuntabilitas Publik (X_1), Partisipasi Masyarakat (X_2), Kebijakan Publik (X_3) dan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran (X_4). | Pengawasan Keuangan Daerah (Y) | Analisis Regresi Linier Berganda | Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntansi publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) di DPRD Kabupaten Karanganyar. |

| | | | | | | |
|---|----------------------|---|---|--|----------------------------------|---|
| | | DPRD Kabupaten Karanganyar. | | | | |
| 2 | Saridewi (2015) | Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Studi Kasus : Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kota Denpasar Tahun 2013). | Transparansi (X_1), akuntabel (X_2), ekonomis (X_3), efektif (X_4) dan efisien (X_5). | Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Y) | Analisis Regresi Linier Berganda | Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi, akuntabel, ekonomis, efektif dan efisien berpengaruh positif dan signifikan terhadap Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah. |
| 3 | Mukarif (2013) | Analisis kinerja anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kota Surakarta melalui Pendekatan Value For Mone (Tahun Anggaran 2009-2011). | Ekonomis (X_1), efektif (X_2) dan efisien (X_3). | Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Y) | Analisis Regresi Linier Berganda | Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekonomis, efektif dan efisien berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah. |
| 4 | Muljo (2014) | Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Realisasi APBD | Akuntabilitas (X_1) dan transparansi (X_2). | Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Y) | Analisis Regresi Linier Berganda | Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas dan transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap realisasi APBD. |
| 5 | Setiyaningrum (2017) | Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Pengawasan Terhadap Realiasi APBD Dengan Konsep Value For Money Pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Di Yogyakarta | Akuntabilitas (X_1), Transparansi (X_2) dan Pengawasan (X_3). | Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Y) | Analisis Regresi Linier Berganda | Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas dan transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap realisasi APBD. |

Sumber : Diolah Penulis 2019

C. Kerangka Konseptual

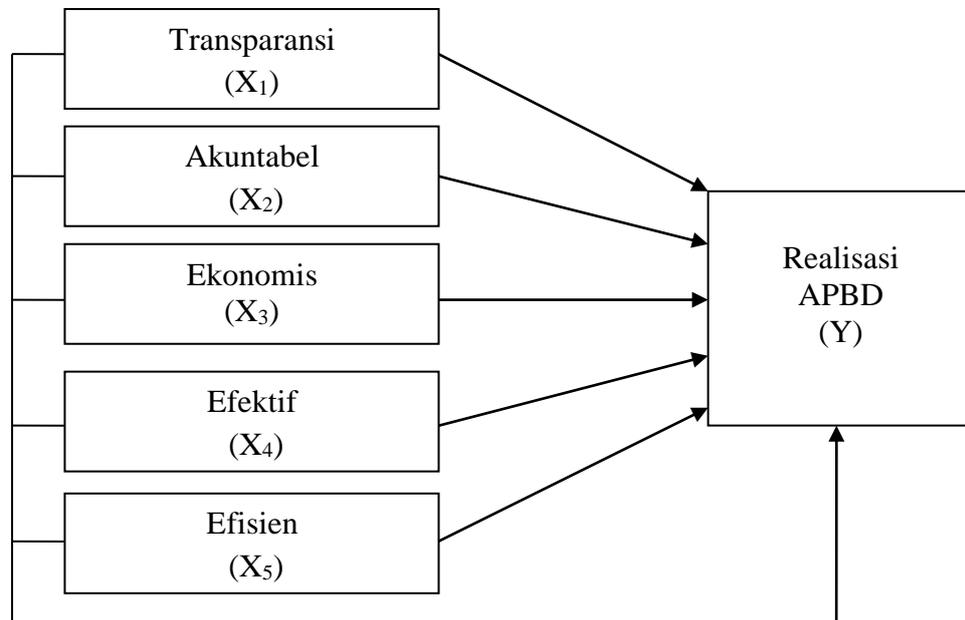
Pengelolaan keuangan daerah dapat dipahami sebagai penggunaan keuangan daerah untuk pelayanan publik yang sudah ditetapkan dalam APBD melalui kegiatan-kegiatan atau tindakan-tindakan untuk dilakukan berdasarkan prinsip Value for Money. Kegiatan pengelolaan APBD dapat dilakukan dengan prinsip value for money yaitu :

1. Ekonomi, adalah hubungan antara pasar (nilai uang) dan masukan (*input*). Ekonomi adalah praktek pembelian barang dan jasa pada kualitas yang diinginkan dan yang memungkinkan. Sesuatu kegiatan operasional dikatakan ekonomis bila dapat menghilangkan atau mengurangi biaya yang dianggap tidak perlu. Oleh sebab itu pada hakekatnya ada pengertian yang serupa antara efisiensi dengan ekonomi karena kedua-duanya menghendaki/menurunkan biaya.
2. Efisiensi, berhubungan erat dengan konsep efektivitas, yaitu ratio yang membandingkan antara *output* yang dihasilkan terhadap input yang digunakan. Proses kegiatan operasional dapat dikatakan dilakukan secara efisien apabila suatu target kinerja (*outcome*) dapat dicapai dengan menggunakan sumber daya dan biaya yang serendah-rendahnya.
3. Efektifitas, merupakan kaitan atau hubungan antara keluaran suatu pusat pertanggungjawaban dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapainya. Efektifitas dalam pemerintahan dapat diartikan penyelesaian kegiatan tepat pada waktunya dan didalam batas anggaran yang tersedia, dapat berarti pula mencapai tujuan dan sasaran seperti apa yang telah direncanakan.

Agar kegiatan pengelolaan APBD dapat berjalan dengan ekonomis, efisien, dan efektif pihak pemegang amanah pengelolaan keuangan harus dilakukan secara akuntabilitas. Akuntabilitas pengelolaan APBD dapat dilihat dari kewajiban pemerintah daerah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan dan melaporkan segala aktifitas dan kegiatan yang terkait dengan menggunakan uang publik, kepada pihak yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (DPRD), Aspek penting dalam akuntabilitas pengelolaan APBD adalah aspek legalitas yaitu setiap transaksi pengeluaran yang dilakukan harus dapat dilacak otoritas legalnya dan aspek pengelolaan atas pengeluaran Negara yang baik, perlindungan asset fisik dan financial, mencegah terjadinya pemborosan dan salah urus. Maka dengan demikian semakin baik dan buruk akuntabilitas publik, maka semakin tinggi atau semakin rendah pengelolaan APBD.

Selain latar belakang akuntabilitas publik, latar belakang transparansi publik juga dapat mempengaruhi pengelolaan APBD. Transparansi publik merupakan prasyarat untuk terjadinya partisipasi masyarakat. Transparansi pengelolaan APBD sangat penting karena terciptanya keterbukaan (*transparency*) informasi bagi publik dapat berdampak positif bagi kehidupan sosial dan ekonomi, serta menjadi salah satu penunjang kontrol masyarakat atas kinerja pemerintah.

Berdasarkan uraian di atas, maka dibuat kerangka penelitian adalah sebagai berikut:



Sumber : Penulis 2019

Gambar 2.1. Kerangka Konseptual

D. Hipotesis

Hipotesis adalah proporsi yang dirumuskan dengan maksud untuk diuji secara empiris. Atas dasar pemikiran di atas, penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut:

1. Transparansi, akuntabel, ekonomis, efektif dan efisien secara parsial berpengaruh signifikan terhadap realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan.
2. Transparansi, akuntabel, ekonomis, efektif dan efisien secara simultan berpengaruh signifikan terhadap realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

“Pendekatan penelitian yaitu penelitian asosiatif yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara dua variabel atau lebih. (Erlina, 2007 : 12)”. Variabel independen yaitu transparansi, akuntabel, ekonomis, efektif dan efisien, sedangkan terhadap variabel dependen yaitu realisasi APBD.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan, alamat Jl. Pinang Baris No.114C, Lalang, Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara 20127, Indonesia.

2. Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan mulai dari bulan Januari 2018 sampai Maret 2019.

Berikut ini tabel skedul proses penelitian adalah:

Tabel 3.1 Skedul Proses Penelitian

| No | Aktivitas | Bulan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----------------------------|-----------------------------|---|---|-------------------------------|---|---|-----------------|---|------------------|---|---------------|---|---|---|--|--|---|---|
| | | Januari- Oktober 2018 | | | November- Desember 2018 | | | Januari 2019 | | Februari 2019 | | Maret 2019 | | | | | | | |
| 1 | Riset awal/Pengajuan Judul | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Penyusunan Proposal | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | |
| 3 | Seminar Proposal | | | | | | | | | ■ | | | | | | | | | |
| 4 | Perbaikan Acc Proposal | | | | | | | | | | ■ | | | | | | | | |
| 5 | Pengolahan Data | | | | | | | | | | | ■ | | | | | | | |
| 6 | Penyusunan Skripsi | | | | | | | | | | | | ■ | | | | | | |
| 7 | Bimbingan Skripsi | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | | | | |
| 8 | Meja Hijau | | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ |

Sumber : Diolah Penulis, 2019

C. Definisi Operasional Variabel

1. Variabel Penelitian

Variabel penelitian mencakup variabel apa yang akan diteliti. Penelitian ini menggunakan 5 (lima) variabel bebas yaitu: transparansi, akuntabel, ekonomis, efektif dan efisien, serta 1 (satu) variabel terikat yaitu realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah.

2. Definisi Operasional

Tujuan dari definisi operasional adalah agar dalam penelitian ini dijabarkan secara jelas definisi dari variabel independen dalam penelitian ini dan menguji pengaruh variabel independen tersebut terhadap variabel dependen.

Tabel 3.2 Operasionalisasi Variabel

| No | Variabel | Definisi | Indikator | Skala Pengukuran |
|----|--------------------------------|--|--|------------------|
| 1 | Transparansi (X ₁) | Keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan keuangan daerah, sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD dan masyarakat. (Sumarsono, 2009). | <ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat pengumuman kebijakan anggaran. 2. Tersedia dokumen anggaran dan mudah diakses. 3. Tersedia laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu. 4. Terakomodasinya suara/usulan rakyat. 5. Terdapat sistem pemberian informasi kepada publik. (Sumarsono, 2009) | Likert |
| 2 | Akuntabel (X ₂) | Kewajiban pihak pemegang amanah (<i>agent</i>) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (<i>principal</i>) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. (Mardisamo, 2011). | <ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu menyajikan informasi penyelenggara secara terbuka, cepat, tepat kepada masyarakat. 2. Mampu memberikan pelayanan yang memuaskan bagi publik. 3. Mampu memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan dan pemerintahan. 4. Mampu menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan publik secara proposional. 5. Adanya sarana bagi publik untuk menilai kinerja pemerintah. | Likert |

| | | | | |
|---|----------------------------|---|--|--------|
| | | | (Mardisamo, 2011) | |
| 3 | Ekonomis (X ₃) | Praktik pembelian barang dan jasa dengan tingkat kualitas tertentu pada harga terbaik yang dimungkinkan (<i>spending less</i>). (Ulum, 2009). | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penggunaan dana masyarakat sesuai kebutuhan sesungguhnya. 2. Pengelolaan secara hati-hati. 3. Tidak ada pemborosan. (Ulum, 2009) | Likert |
| 4 | Efektif (X ₄) | Berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan (hasil guna). (Ulum, 2009). | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penggunaan dana masyarakat yang dapat menghasilkan output maksimal. 2. Hubungan keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. 3. Tujuan dan sasaran akhir kebijakan. (Ulum, 2009) | Likert |
| 5 | Efisien (X ₅) | Berhubungan dengan produktifitas. (Ulum, 2009). | <ol style="list-style-type: none"> 1. Seberapa jauh tingkat output 2. Kebijakan 3. Prosedur dapat mencapai kepentingan publik. (Ulum, 2009) | Likert |
| 6 | Realisasi APBD (Y) | Rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan ditetapkan dengan peraturan daerah. (Noordiawan, 2008). | <ol style="list-style-type: none"> 1. Rincian kebijakan pelaksanaan yang dituangkan secara tertulis dan dapat menjadi pedoman bagi yang menerima pelimpahan wewenang atasan. 2. Rencana kerja yang menggambarkan kegiatan yang harus dilaksanakan. 3. Prosedur kerja yang merupakan petunjuk pelaksanaan yang jelas. (Noordiawan, 2008) | Likert |

Sumber: Penulis (2019)

D. Populasi dan Sampel / Jenis dan Sumber Data

1. Populasi

“Populasi adalah sekelompok entitas yang lengkap yang dapat berupa orang, kejadian, atau benda yang mempunyai karakteristik tertentu yang berada dalam suatu wilayah dan memenuhi syarat-syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian (Erlina, 2009 : 81)”. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai bagian keuangan, bagian bendahara

dan bagian umum Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan yaitu sebanyak 33 pegawai.

2. Sampel

“Sampel adalah bagian populasi yang digunakan untuk memperkirakan karakteristik populasi (Erlina, 2009 : 82)”. Pada penelitian ini penulis melakukan teknik penarikan sampel dengan metode sampel jenuh yaitu seluruh populasi dijadikan sampel.

3. Jenis dan Sumber Data

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden terpilih pada lokasi penelitian. Data primer diperoleh dengan menggunakan daftar kuesioner dan wawancara langsung kepada pegawai bagian keuangan, bagian bendahara dan bagian umum Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan.

E. Teknik Pengumpulan Data

“Metode pengumpulan data yang dilakukan di dalam penelitian ini adalah metode angket/kuesioner yaitu memberikan daftar pertanyaan kepada responden yang telah ditetapkan sebagai sampel atau responden penelitian (Erlina, 2009 : 20)”. Kuesioner untuk penelitian ini diadopsi dari Sumarsono (2009) untuk variabel transparansi, untuk variabel akuntabel diadopsi dari Mardiasmo (2011), “untuk variabel ekonomis diadopsi dari Ulum (2009), untuk variabel Efektif diadopsi dari Ulum (2009), untuk variabel Efisien diadopsi dari Ulum (2009), dan untuk variabel realisasi APBD diadopsi dari Noordiawan (2008)”.

Pada penelitian ini responden memilih salah satu dari jawaban yang tersedia, kemudian masing-masing jawaban diberi skor tertentu. Total skor inilah yang ditafsir sebagai posisi responden dalam skala *Likert*. Kriteria pengukurannya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3 Skor Pendapat Responden

| No | Jawaban | Skor |
|----|---------------------|------|
| 1 | Sangat Setuju | 5 |
| 2 | Setuju | 4 |
| 3 | Ragu-Ragu | 3 |
| 4 | Tidak Setuju | 2 |
| 5 | Sangat Tidak Setuju | 1 |

Sumber : Erlina (2009:21)

F. Teknik Analisis Data

1. Uji Kualitas Data

Sebelum data dianalisis dan dievaluasi, terlebih dahulu data tersebut diuji dengan:

a. Uji Validitas

Untuk mengetahui kelayakan : untuk mengetahui kelayakan butir-butir dalam suatu daftar pertanyaan (angket) yang akan disajikan kepada pada responden maka diperlukan uji validitas setiap pertanyaan lebih besar ($>$) 0,30 maka butir pertanyaan dianggap valid.

b. Uji Realibilitas (kehandalan)

Untuk mengetahui kestabilan dan konsisten responden dalam menjawab butir-butir berkaitan dengan konstruk pertanyaan yang disusun dalam bentuk quisioner. Realibilitas suatu konstruk variabel dikatakan baik jika memiliki nilai *Cronbach's alpha* lebih besar ($>$) 0,60.

Dengan menerapkan rumus tersebut pada data yang tersedia maka dapatlah suatu gambaran yang menjelaskan pengaruh maupun hubungan antara variabel-variabel yang diteliti penulis. Berdasarkan data yang telah didapat kemudian diolah dan dianalisa selain menggunakan rumus diatas dapat dihitung dengan bantuan program *Statistical Product and Service Solution (SPSS)* versi 16.0 atau bantuan aplikasi *Software SPSS 16.0 For Windows*.

2. Uji Asumsi Klasik

Menurut Situmorang (2014 : 114), “Uji asumsi klasik adalah persyaratan statistik yang harus dipenuhi pada analisis regresi linear berganda yang berbasis *ordinary least square (OLS)*. Jika hasil regresi telah memenuhi asumsi-asumsi regresi maka nilai estimasi yang diperoleh akan bersifat BLUE (*Best, Linear, Unbiased, Estimator*). BLUE adalah asumsi yang dikembangkan oleh *Gauss Markov Theorem*. Sebelum melakukan analisis regresi, maka dilakukan pengujian asumsi klasik yang harus dipenuhi, yaitu: uji normalitas, uji multikolinearitas dan uji heterokedastisitas”.

a. Uji Normalitas

“Tujuan uji normalitas adalah ingin mengetahui apakah distribusi sebuah data mengikuti atau mendekati distribusi normal, yakni distribusi data dengan bentuk lonceng. Data yang baik adalah data yang mempunyai pola seperti distribusi normal, yakni distribusi data tersebut tidak menceng ke kiri atau menceng ke kanan (Situmorang, 2014 : 114)”. Untuk menguji hal tersebut dapat dipergunakan metode

grafis. Normal P-P Plot dari *standardized residual cumulative probability*, dengan mengidentifikasi apabila sebenarnya berada di sekitar garis normal, maka asumsi kenormalan dapat dipenuhi. Selain itu Uji Kolmogorov-Sminov juga dipergunakan untuk melihat kenormalan dengan identifikasi juga nilai P-value lebih besar dari alpha, maka asumsi kenormalan dapat diterima. Dengan menggunakan tingkat signifikansi 5% (0,05) maka jika nilai Asymp.Sig (2-tailed) diatas nilai signifikansi 5% (0,05) artinya variabel residual berdistribusi normal.

b. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas digunakan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas atau dengan kata lain variabel independen yang satu dengan yang lain dalam model regresi berganda tidak boleh saling berhubungan secara sempurna atau mendekati sempurna. Untuk mengetahui ada tidaknya multikolinieritas di dalam model regresi dapat dilihat dari besarnya nilai *Tolerance* dan VIF (*Variance Inflation Factor*) melalui SPSS dengan ketentuan :

- 1) Bila $VIF > 10$ dan $Tolerance < 0,1$ maka terdapat masalah multikolinieritas.
- 2) Bila $VIF < 10$ dan $Tolerance > 0,1$ maka tidak terdapat masalah multikolinieritas.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji data residu tidak bersifat acak. Residu yaitu variabel-variabel lain yang terlibat akan tetapi tidak termuat di dalam model sehingga residu adalah variabel tidak diketahui sehingga di asumsikan bersifat acak. Karena diasumsikan acak, maka besarnya residu tidak terkait dengan besarnya nilai prediksi. Uji heteroskedastisitas juga pada prinsipnya ingin menguji apakah sebuah grup mempunyai varian yang sama diantara anggota grup tersebut. Jika varian sama dan ini yang seharusnya terjadi maka dikatakan ada homoskedastisitas, sedangkan jika varian tidak sama dikatakan terjadi heteroskedastisitas. “Cara mendeteksinya adalah dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot yang disajikan, terlihat titik-titik menyebar secara acak tidak membentuk suatu pola tertentu yang jelas serta tersebut baik diatas maupun dibawah angka nol pada sumbu Y, hal ini berarti tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga regresi layak dipakai untuk memprediksi keputusan konsumen berdasarkan masukan variabel independenya (Situmorang, 2014 : 125)”.

3. Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linear berganda menurut Situmorang (2014:166) “digunakan untuk mengetahui berapa besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat, dengan rumus”:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + \epsilon$$

Keterangan :

Y = Realisasi APBD (*Dependent Variabel*)

α = Konstanta

β = Koefisien Regresi Berganda (*Multiple Regression*)

X₁ = Transparansi (*Independent Variabel*)

X₂ = Akuntabel (*Independent Variabel*)

X₃ = Ekonomis (*Independent Variabel*)

X₄ = Efektif (*Independent Variabel*)

X₅ = Efisien (*Independent Variabel*)

ϵ = Error term

4. Uji Kesuaian (*Test Goodness Of Fit*)

a. Uji Simultan (Uji F)

Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh secara bersama-sama variabel bebas terhadap variabel terikat. Uji F menguji apakah hipotesis yang diajukan diterima atau ditolak dengan nilai alpha = 0,05 (5%).

Kriteria pengujian adalah :

- 1) H₀ : b₁ = 0, artinya secara serentak tidak terdapat pengaruh yang positif dan signifikan dari variabel bebas terhadap variabel terikat.
- 2) H₀ : b₁ ≠ 0, artinya secara serentak terdapat pengaruh yang positif dan signifikan dari variabel bebas terhadap variabel terikat.

Kriteria pengambilan keputusannya :

H₀ diterima jika F_{hitung} < F_{tabel}, pada $\alpha = 5\%$

H₀ ditolak jika F_{hitung} > F_{tabel}, pada $\alpha = 5\%$

b. Uji Parsial (Uji t)

Uji t digunakan untuk menguji sendiri-sendiri secara signifikan hubungan antara variabel bebas (X) dengan variabel terikat (Y) dengan nilai $\alpha = 0,05\%$. Kriteria pengujiannya adalah sebagai berikut:

$H_0 : b_1 = 0$, artinya secara parsial tidak terdapat pengaruh yang positif dan signifikan dari variabel bebas terhadap variabel terikat.

$H_0 : b_1 \neq 0$, artinya secara parsial terdapat pengaruh yang positif dan signifikan dari variabel bebas terhadap variabel terikat.

Kriteria pengambilan keputusannya, yaitu :

H_0 diterima jika $t_{hitung} < t_{tabel}$, pada $\alpha = 5\%$

H_0 ditolak jika $t_{hitung} > t_{tabel}$, pada $\alpha = 5\%$

c. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinan digunakan untuk mengukur seberapa kemampuan model dalam menerangkan variabel terikat. Jika nilai mendekati angka 1 maka variabel bebas makin mendekati hubungan dengan variabel terikat atau dapat dikatakan bahwa penggunaan model tersebut dapat dibenarkan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Objek Penelitian

a. Sejarah Singkat Pemerintahan Kota Medan

Kampung kecil, yang dalam masa kurang lebih 80 tahun dengan pesat berkembang menjadi kota, yang dewasa ini kita kenal sebagai kota Medan, berada di satu tanah datar atau Medan, ditempat sungai Babura bertemu dengan sungai Deli, yang di waktu itu dikenal sebagai “Medan Putri”, tidak jauh dari jalan Putri Hijau sekarang. Menurut Tengku Lukman Sinar, SH dalam bukunya yang bernama “Riwayat hampiran perak” yang terbit dalam tahun 1971, yang mendirikan kampong medan adalah Raja Guru Patimpus, nenek moyang Datuk Hamparan perak (Dua Belas Kuta) dan Datuk Sukapiring, yaitu dua dari tempat Kepala Suku Kesultanan Deli. Deli mulai terkenal namanya setelah orang-orang Belanda, yang dipelopori Neinhuis, membuka perkebunan tembakau di sekitar Medan. Dalam beberapa tahun saja deli terkenal diseluruh dunia karena dalam tembakau yang dihasilkannya tidak ada tandingan sampai sekarang sebagai daun pembungkus cerutu. Hal ini menarik investor-investor asing dan menyebabkan banyak orang-orang dari daerah lain yang pindah ke daerah Deli untuk mencari nafkah. Neinhuis kemudian meninggalkan kantornya dari labuhan ke Medan Putri dari tempat mana kota Medan berkembang dengan pesat dan akhirnya menjadi pusat pemerintahan Provinsi Sumatera Utara Timur dan Kerajaan Deli.

Di tahun 1981, Medan menjadikan Kotapraja, tetapi tidak termasuk dalamnya daerah kota Maksum dan daerah sungai Kera yang tetap berada dibawah kawasan Sultan Deli. Ketika itu, penduduk Medan telah berjumlah 43,826 jiwa, dan terdiri dari 409 orang bangsa Eropa, 25.000 orang bangsa Indonesia 8.269 orang bangsa Cina dan 130 orang bangsa Asing lainnya.

Kemudian melalui undang-undang darurat No.7 dan tahun 1956, dibentuk di provinsi Sumatera Utara daerah-daerah Tingkat II. Antara lain, Kabupaten Deli Serdang dan Kotamadya Medan. Perkembangan selanjutnya di Provinsi Sumatera Utara umumnya dan Kotamadya khususnya, memerlukan perluasan daerah untuk mampu menampung laju perkembangan. Oleh karena itu, maka dikeluarkan peraturan pemerintah No.22 Tahun 1973, melalui nama dimasukkan beberapa bagian dari Kabupaten dan 116 Kelurahan dengan surat persetujuan Mendagri No.140/2271/PUOD tanggal 05 Mei.

b. Visi Misi Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan

1) Visi

Terwujudnya infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang handal dalam mendukung indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.

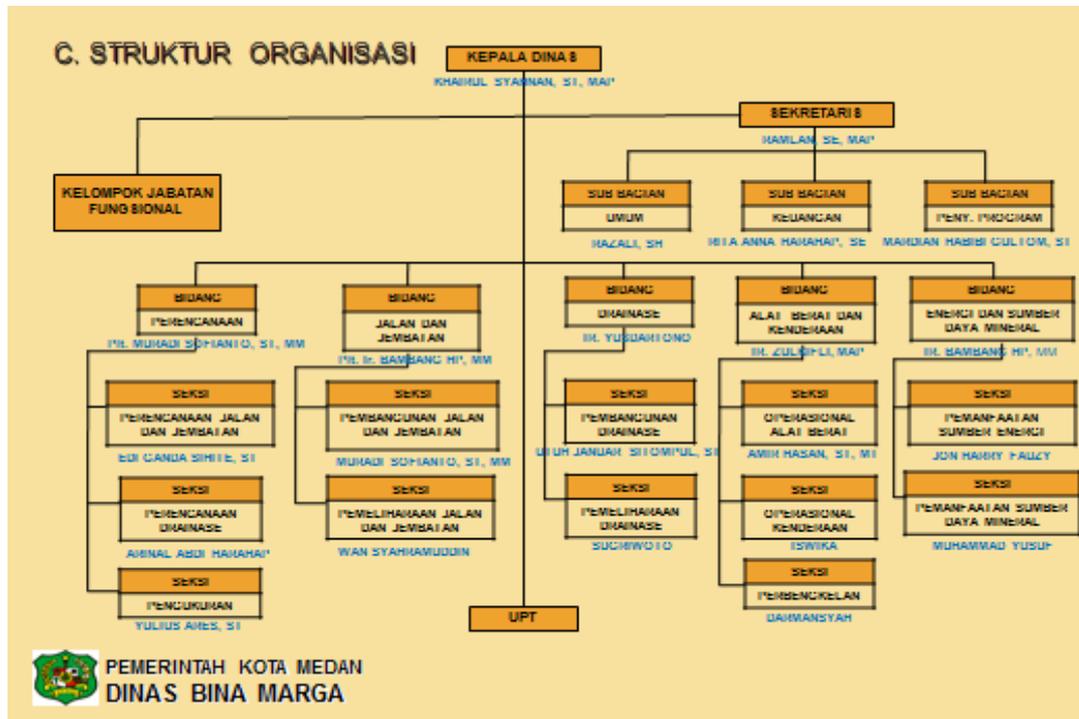
2) Misi

- a) Mempercepat pembangunan infrastruktur sumberdaya air termasuk sumber daya maritim untuk mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan, dan kedaulatan energi, guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi;

- b) Mempercepat pembangunan infrastruktur jalan untuk mendukung konektivitas guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritim.
- c) Mempercepat pembangunan infrastruktur permukiman dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak dalam rangka mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip 'infrastruktur untuk semua.
- d) Mempercepat pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat secara terpadu dari pinggiran didukung industri konstruksi yang berkualitas untuk keseimbangan pembangunan antardaerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan, dalam kerangka NKRI.
- e) Meningkatkan tata kelola sumber daya organisasi bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang meliputi sumber daya manusia, pengendalian dan pengawasan, kesekretariatan serta penelitian dan pengembangan untuk mendukung fungsi manajemen meliputi perencanaan yang terpadu, pengorganisasian yang efisien, pelaksanaan yang tepat, dan pengawasan yang ketat.

c. Struktur Organisasi Pekerjaan Umum Kota Medan

Struktur organisasi pada Pekerjaan Umum Kota Medan adalah sebagai berikut:



Sumber : Pekerjaan Umum Kota Medan (2019)

Gambar 4.1. Struktur Organisasi Pekerjaan Umum Kota Medan

2. Penyajian Data

Dalam penyebaran angket, masing-masing butir pernyataan dari setiap variabel harus di isi oleh responden yang berjumlah 33 orang. Jawaban angket disediakan dalam 5 alternatif jawaban, yaitu:

- Sangat Setuju (SS) dengan skor 5
- Setuju (S) dengan skor 4
- Ragu-Ragu (R) dengan skor 3
- Tidak Setuju (TS) dengan skor 2
- Sangat Tidak Setuju (STS) dengan skor 1

Adapun jawaban-jawaban dari responden yang diperoleh akan ditampilkan pada tabel-tabel berikut:

a. Transparansi (X₁)

Tabel 4.1
Terdapat pengumuman kebijakan anggaran.
Pernyataan X1.1

| | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|--------------------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid Tidak Setuju | 10 | 30.3 | 30.3 | 30.3 |
| Ragu-Ragu | 10 | 30.3 | 30.3 | 60.6 |
| Setuju | 12 | 36.4 | 36.4 | 97.0 |
| Sangat Setuju | 1 | 3.0 | 3.0 | 100.0 |
| Total | 33 | 100.0 | 100.0 | |

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0, Data, Diolah Penulis (2019)

Berdasarkan tabel 4.1 di atas, didapat data bahwa yang menyatakan sangat setuju sebanyak 1 orang (3.0%), setuju sebanyak 12 orang (36.4%), ragu-ragu sebanyak 10 orang (30.3%) dan sebanyak 10 orang (30.3%) responden yang menyatakan tidak setuju. Dari jawaban responden paling banyak adalah yang menyatakan setuju sebanyak 12 orang (36.4%). Jadi dapat disimpulkan responden setuju bahwa terdapat pengumuman kebijakan anggaran.

Tabel 4.2
Tersedia dokumen anggaran dan mudah diakses.
Pernyataan X1.2

| | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|--------------------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid Tidak Setuju | 10 | 30.3 | 30.3 | 30.3 |
| Ragu-Ragu | 8 | 24.2 | 24.2 | 54.5 |
| Setuju | 11 | 33.3 | 33.3 | 87.9 |
| Sangat Setuju | 4 | 12.1 | 12.1 | 100.0 |
| Total | 33 | 100.0 | 100.0 | |

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0, Data, Diolah Penulis (2019)

Berdasarkan tabel 4.2 di atas, didapat data bahwa yang menyatakan sangat setuju sebanyak 4 orang (12.1%), setuju sebanyak 11 orang (33.3%), ragu-ragu sebanyak 8 orang (24.2%) dan sebanyak 10 orang (30.3%) responden yang

menyatakan tidak setuju. Dari jawaban responden paling banyak adalah yang menyatakan setuju sebanyak 11 orang (33.3%). Jadi dapat disimpulkan responden setuju bahwa tersedia dokumen anggaran dan mudah diakses.

Tabel 4.3
Tersedia laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu.
Pernyataan X1.3

| | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|--------------------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid Tidak Setuju | 10 | 30.3 | 30.3 | 30.3 |
| Ragu-Ragu | 14 | 42.4 | 42.4 | 72.7 |
| Setuju | 6 | 18.2 | 18.2 | 90.9 |
| Sangat Setuju | 3 | 9.1 | 9.1 | 100.0 |
| Total | 33 | 100.0 | 100.0 | |

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0, Data, Diolah Penulis (2019)

Berdasarkan tabel 4.3 di atas, didapat data bahwa yang menyatakan sangat setuju sebanyak 3 orang (9.1%), setuju sebanyak 6 orang (18.2%), ragu-ragu sebanyak 14 orang (42.4%) dan sebanyak 10 orang (30.3%) responden yang menyatakan tidak setuju. Dari jawaban responden paling banyak adalah yang menyatakan ragu-ragu sebanyak 14 orang (42.4%). Jadi dapat disimpulkan responden ragu-ragu bahwa tersedia laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu.

Tabel 4.4
Terakomodasinya suara/usulan rakyat.
Pernyataan X1.4

| | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|--------------------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid Tidak Setuju | 6 | 18.2 | 18.2 | 18.2 |
| Ragu-Ragu | 10 | 30.3 | 30.3 | 48.5 |
| Setuju | 16 | 48.5 | 48.5 | 97.0 |
| Sangat Setuju | 1 | 3.0 | 3.0 | 100.0 |
| Total | 33 | 100.0 | 100.0 | |

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0, Data, Diolah Penulis (2019)

Berdasarkan tabel 4.4 di atas, didapat data bahwa yang menyatakan sangat setuju sebanyak 1 orang (3.0%), setuju sebanyak 16 orang (48.5%), ragu-ragu

sebanyak 10 orang (30.3%) dan sebanyak 6 orang (18.2%) responden yang menyatakan tidak setuju. Dari jawaban responden paling banyak adalah yang menyatakan setuju sebanyak 16 orang (48.5%). Jadi dapat disimpulkan responden setuju bahwa terakomodasinya suara/usulan rakyat.

Tabel 4.5
Terdapat sistem pemberian informasi kepada publik.
Pernyataan X1.5

| | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|--------------------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid Tidak Setuju | 10 | 30.3 | 30.3 | 30.3 |
| Ragu-Ragu | 13 | 39.4 | 39.4 | 69.7 |
| Setuju | 9 | 27.3 | 27.3 | 97.0 |
| Sangat Setuju | 1 | 3.0 | 3.0 | 100.0 |
| Total | 33 | 100.0 | 100.0 | |

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0, Data, Diolah Penulis (2019)

Berdasarkan tabel 4.5 di atas, didapat data bahwa yang menyatakan sangat setuju sebanyak 1 orang (3.0%), setuju sebanyak 9 orang (27.3%), ragu-ragu sebanyak 13 orang (39.4%) dan sebanyak 10 orang (30.3%) responden yang menyatakan tidak setuju. Dari jawaban responden paling banyak adalah yang menyatakan ragu-ragu sebanyak 13 orang (39.4%). Jadi dapat disimpulkan responden ragu-ragu bahwa terdapat sistem pemberian informasi kepada publik.

b. Akuntabel (X₂)

Tabel 4.6
Mampu menyajikan informasi penyelenggara secara terbuka, cepat, tepat kepada masyarakat.
Pernyataan X2.1

| | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|--------------------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid Tidak Setuju | 1 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| Ragu-Ragu | 16 | 48.5 | 48.5 | 51.5 |
| Setuju | 14 | 42.4 | 42.4 | 93.9 |
| Sangat Setuju | 2 | 6.1 | 6.1 | 100.0 |
| Total | 33 | 100.0 | 100.0 | |

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0, Data, Diolah Penulis (2019)

Berdasarkan tabel 4.6 di atas, didapat data bahwa yang menyatakan sangat setuju sebanyak 2 orang (6.1%), setuju sebanyak 14 orang (42.4%), ragu-ragu sebanyak 16 orang (48.5%) dan sebanyak 1 orang (3.0%) responden yang menyatakan tidak setuju. Dari jawaban responden paling banyak adalah yang menyatakan ragu-ragu sebanyak 16 orang (48.5%). Jadi dapat disimpulkan responden ragu-ragu bahwa mampu menyajikan informasi penyelenggara secara terbuka, cepat, tepat kepada masyarakat.

Tabel 4.7
Mampu memberikan pelayanan yang memuaskan bagi publik.
Pernyataan X2.2

| | | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|-------|--------------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid | Tidak Setuju | 5 | 15.2 | 15.2 | 15.2 |
| | Ragu-Ragu | 13 | 39.4 | 39.4 | 54.5 |
| | Setuju | 15 | 45.5 | 45.5 | 100.0 |
| Total | | 33 | 100.0 | 100.0 | |

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0, Data, Diolah Penulis (2019)

Berdasarkan tabel 4.7 di atas, didapat data bahwa yang menyatakan setuju sebanyak 15 orang (45.5%), ragu-ragu sebanyak 13 orang (39.4%) dan sebanyak 5 orang (15.2%) responden yang menyatakan tidak setuju. Dari jawaban responden paling banyak adalah yang menyatakan setuju sebanyak 15 orang (45.5%). Jadi dapat disimpulkan responden masih ada yang menyatakan setuju bahwa mampu memberikan pelayanan yang memuaskan bagi publik.

Tabel 4.8
Mampu memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan dan pemerintahan.
Pernyataan X2.3

| | | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|-------|--------------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid | Tidak Setuju | 6 | 18.2 | 18.2 | 18.2 |
| | Ragu-Ragu | 20 | 60.6 | 60.6 | 78.8 |
| | Setuju | 7 | 21.2 | 21.2 | 100.0 |
| Total | | 33 | 100.0 | 100.0 | |

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0, Data, Diolah Penulis (2019)

Berdasarkan tabel 4.8 di atas, didapat data bahwa yang menyatakan setuju sebanyak 7 orang (21.2%), ragu-ragu sebanyak 20 orang (60.6%) dan sebanyak 6 orang (18.2%) responden yang menyatakan tidak setuju. Dari jawaban responden paling banyak adalah yang menyatakan ragu-ragu sebanyak 20 orang (60.6%). Jadi dapat disimpulkan responden ragu-ragu bahwa mampu memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan dan pemerintahan.

Tabel 4.9
Mampu menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan publik secara proposional.

Pernyataan X2.4

| | | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|-------|---------------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid | Tidak Setuju | 6 | 18.2 | 18.2 | 18.2 |
| | Ragu-Ragu | 10 | 30.3 | 30.3 | 48.5 |
| | Setuju | 16 | 48.5 | 48.5 | 97.0 |
| | Sangat Setuju | 1 | 3.0 | 3.0 | 100.0 |
| | Total | 33 | 100.0 | 100.0 | |

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0, Data, Diolah Penulis (2019)

Berdasarkan tabel 4.9 di atas, didapat data bahwa yang menyatakan sangat setuju sebanyak 1 orang (3.0%), setuju sebanyak 16 orang (48.5%), ragu-ragu sebanyak 10 orang (30.3%) dan sebanyak 6 orang (18.2%) responden yang menyatakan tidak setuju. Dari jawaban responden paling banyak adalah yang menyatakan setuju sebanyak 16 orang (48.5%). Jadi dapat disimpulkan responden setuju bahwa mampu menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan publik secara proposional.

Tabel 4.10
Adanya sarana bagi publik untuk menilai kinerja pemerintah.
Pernyataan X2.5

| | | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|-------|---------------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid | Tidak Setuju | 3 | 9.1 | 9.1 | 9.1 |
| | Ragu-Ragu | 15 | 45.5 | 45.5 | 54.5 |
| | Setuju | 10 | 30.3 | 30.3 | 84.8 |
| | Sangat Setuju | 5 | 15.2 | 15.2 | 100.0 |
| | Total | 33 | 100.0 | 100.0 | |

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0, Data, Diolah Penulis (2019)

Berdasarkan tabel 4.10 di atas, didapat data bahwa yang menyatakan sangat setuju sebanyak 5 orang (15.2%), setuju sebanyak 10 orang (30.3%), ragu-ragu sebanyak 15 orang (45.5%), dan sebanyak 3 orang (9.1%) responden yang menyatakan tidak setuju. Dari jawaban responden paling banyak adalah yang menyatakan ragu-ragu sebanyak 15 orang (45.5%). Jadi dapat disimpulkan responden ragu-ragu bahwa adanya sarana bagi publik untuk menilai kinerja pemerintah.

c. Ekonomis (X₃)

Tabel 4.11
Penggunaan dana masyarakat sesuai kebutuhan sesungguhnya.
Pernyataan X3.1

| | | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|-------|---------------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid | Tidak Setuju | 3 | 9.1 | 9.1 | 9.1 |
| | Ragu-Ragu | 6 | 18.2 | 18.2 | 27.3 |
| | Setuju | 14 | 42.4 | 42.4 | 69.7 |
| | Sangat Setuju | 10 | 30.3 | 30.3 | 100.0 |
| | Total | 33 | 100.0 | 100.0 | |

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0, Data, Diolah Penulis (2019)

Berdasarkan tabel 4.11 di atas, didapat data bahwa yang menyatakan sangat setuju sebanyak 10 orang (30.3%), setuju sebanyak 14 orang (42.4%), ragu-ragu sebanyak 6 orang (18.2%) dan sebanyak 3 orang (9.1%) responden yang

menyatakan tidak setuju. Dari jawaban responden paling banyak adalah yang menyatakan setuju sebanyak 14 orang (42.4%). Jadi dapat disimpulkan responden setuju bahwa penggunaan dana masyarakat sesuai kebutuhan sesungguhnya.

Tabel 4.12
Pengelolaan secara hati-hati.
Pernyataan X3.2

| | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|--------------------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid Tidak Setuju | 11 | 33.3 | 33.3 | 33.3 |
| Ragu-Ragu | 2 | 6.1 | 6.1 | 39.4 |
| Setuju | 4 | 12.1 | 12.1 | 51.5 |
| Sangat Setuju | 16 | 48.5 | 48.5 | 100.0 |
| Total | 33 | 100.0 | 100.0 | |

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0, Data, Diolah Penulis (2019)

Berdasarkan tabel 4.12 di atas, didapat data bahwa yang menyatakan sangat setuju sebanyak 16 orang (48.5%), setuju sebanyak 4 orang (12.1%), ragu-ragu sebanyak 2 orang (6.1%) dan sebanyak 11 orang (33.3%) responden yang menyatakan tidak setuju. Dari jawaban responden paling banyak adalah yang menyatakan sangat setuju sebanyak 16 orang (48.5%). Jadi dapat disimpulkan responden masih ada yang menyatakan sangat setuju bahwa pengelolaan secara hati-hati.

Tabel 4.13
Tidak ada pemborosan.
Pernyataan X3.3

| | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|---------------------------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid Sangat Tidak Setuju | 4 | 12.1 | 12.1 | 12.1 |
| Tidak Setuju | 3 | 9.1 | 9.1 | 21.2 |
| Ragu-Ragu | 2 | 6.1 | 6.1 | 27.3 |
| Setuju | 4 | 12.1 | 12.1 | 39.4 |
| Sangat Setuju | 20 | 60.6 | 60.6 | 100.0 |
| Total | 33 | 100.0 | 100.0 | |

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0, Data, Diolah Penulis (2019)

Berdasarkan tabel 4.13 di atas, didapat data bahwa yang menyatakan sangat setuju sebanyak 20 orang (60.6%), setuju sebanyak 4 orang (12.1%), ragu-ragu sebanyak 2 orang (6.1%), tidak setuju sebanyak 3 orang (9.1%) dan sebanyak 4 orang (12.1%) responden yang menyatakan sangat tidak setuju. Dari jawaban responden paling banyak adalah yang menyatakan sangat setuju sebanyak 20 orang (60.6%). Jadi dapat disimpulkan responden sangat setuju bahwa tidak ada pemborosan.

d. Efektif (X₄)

Tabel 4.14
Penggunaan dana masyarakat yang dapat menghasilkan output maksimal.
Pernyataan X4.1

| | | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|-------|---------------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid | Tidak Setuju | 6 | 18.2 | 18.2 | 18.2 |
| | Ragu-Ragu | 8 | 24.2 | 24.2 | 42.4 |
| | Setuju | 14 | 42.4 | 42.4 | 84.8 |
| | Sangat Setuju | 5 | 15.2 | 15.2 | 100.0 |
| | Total | 33 | 100.0 | 100.0 | |

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0, Data, Diolah Penulis (2019)

Berdasarkan tabel 4.14 di atas, didapat data bahwa yang menyatakan sangat setuju sebanyak 5 orang (15.2%), setuju sebanyak 14 orang (42.4%), ragu-ragu sebanyak 8 orang (24.2%) dan sebanyak 6 orang (18.2%) responden yang menyatakan tidak setuju. Dari jawaban responden paling banyak adalah yang menyatakan setuju sebanyak 14 orang (42.4%). Jadi dapat disimpulkan responden setuju bahwa penggunaan dana masyarakat yang dapat menghasilkan output maksimal.

Tabel 4.15
Hubungan keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai.
Pernyataan X4.2

| | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|--------------------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid Tidak Setuju | 6 | 18.2 | 18.2 | 18.2 |
| Ragu-Ragu | 18 | 54.5 | 54.5 | 72.7 |
| Setuju | 9 | 27.3 | 27.3 | 100.0 |
| Total | 33 | 100.0 | 100.0 | |

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0, Data, Diolah Penulis (2019)

Berdasarkan tabel 4.15 di atas, didapat data bahwa yang menyatakan setuju sebanyak 9 orang (27.3%), ragu-ragu sebanyak 18 orang (54.5%) dan sebanyak 6 orang (18.2%) responden yang menyatakan tidak setuju. Dari jawaban responden paling banyak adalah yang menyatakan ragu-ragu sebanyak 18 orang (54.5%). Jadi dapat disimpulkan responden masih ada yang menyatakan ragu-ragu bahwa hubungan keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai.

Tabel 4.16
Tujuan dan sasaran akhir kebijakan baik.
Pernyataan X4.3

| | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|--------------------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid Tidak Setuju | 8 | 24.2 | 24.2 | 24.2 |
| Ragu-Ragu | 12 | 36.4 | 36.4 | 60.6 |
| Setuju | 11 | 33.3 | 33.3 | 93.9 |
| Sangat Setuju | 2 | 6.1 | 6.1 | 100.0 |
| Total | 33 | 100.0 | 100.0 | |

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0, Data, Diolah Penulis (2019)

Berdasarkan tabel 4.16 di atas, didapat data bahwa yang menyatakan sangat setuju sebanyak 2 orang (6.1%), setuju sebanyak 11 orang (33.3%), ragu-ragu sebanyak 12 orang (36.4%) dan sebanyak 8 orang (24.2%) responden yang menyatakan tidak setuju. Dari jawaban responden paling banyak adalah yang menyatakan ragu-ragu sebanyak 12 orang (36.4%). Jadi dapat disimpulkan responden ragu-ragu bahwa tujuan dan sasaran akhir kebijakan baik.

e. Efisien (X₅)

Tabel 4.17
Tingkat output sesuai dengan keinginan.
Pernyataan X5.1

| | | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|-------|---------------------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid | Sangat Tidak Setuju | 2 | 6.1 | 6.1 | 6.1 |
| | Tidak Setuju | 3 | 9.1 | 9.1 | 15.2 |
| | Ragu-Ragu | 8 | 24.2 | 24.2 | 39.4 |
| | Setuju | 15 | 45.5 | 45.5 | 84.8 |
| | Sangat Setuju | 5 | 15.2 | 15.2 | 100.0 |
| | Total | 33 | 100.0 | 100.0 | |

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0, Data, Diolah Penulis (2019)

Berdasarkan tabel 4.17 di atas, didapat data bahwa yang menyatakan sangat setuju sebanyak 5 orang (15.2%), setuju sebanyak 15 orang (45.5%), ragu-ragu sebanyak 8 orang (24.2%), tidak setuju sebanyak 3 orang (9.1%) dan sebanyak 2 orang (6.1%) responden yang menyatakan sangat tidak setuju. Dari jawaban responden paling banyak adalah yang menyatakan setuju sebanyak 15 orang (45.5%). Jadi dapat disimpulkan responden setuju bahwa tingkat output sesuai dengan keinginan.

Tabel 4.18
Pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan kebijakan organisasi.
Pernyataan X5.2

| | | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|-------|---------------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid | Tidak Setuju | 1 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| | Ragu-Ragu | 12 | 36.4 | 36.4 | 39.4 |
| | Setuju | 14 | 42.4 | 42.4 | 81.8 |
| | Sangat Setuju | 6 | 18.2 | 18.2 | 100.0 |
| | Total | 33 | 100.0 | 100.0 | |

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0, Data, Diolah Penulis (2019)

Berdasarkan tabel 4.18 di atas, didapat data bahwa yang menyatakan sangat setuju sebanyak 6 orang (18.2%), setuju sebanyak 14 orang (42.4%), ragu-ragu sebanyak 12 orang (36.4%) dan sebanyak 1 orang (3.0%) responden yang

menyatakan tidak setuju. Dari jawaban responden paling banyak adalah yang menyatakan setuju sebanyak 14 orang (42.4%). Jadi dapat disimpulkan responden masih ada yang menyatakan setuju bahwa pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan kebijakan organisasi.

Tabel 4.19
Prosedur dapat mencapai kepentingan publik.
Pernyataan X5.3

| | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|--------------------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid Tidak Setuju | 7 | 21.2 | 21.2 | 21.2 |
| Ragu-Ragu | 8 | 24.2 | 24.2 | 45.5 |
| Setuju | 14 | 42.4 | 42.4 | 87.9 |
| Sangat Setuju | 4 | 12.1 | 12.1 | 100.0 |
| Total | 33 | 100.0 | 100.0 | |

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0, Data, Diolah Penulis (2019)

Berdasarkan tabel 4.19 di atas, didapat data bahwa yang menyatakan sangat setuju sebanyak 4 orang (12.1%), setuju sebanyak 14 orang (42.4%), ragu-ragu sebanyak 8 orang (24.2%) dan sebanyak 7 orang (21.2%) responden yang menyatakan tidak setuju. Dari jawaban responden paling banyak adalah yang menyatakan setuju sebanyak 14 orang (42.4%). Jadi dapat disimpulkan responden setuju bahwa prosedur dapat mencapai kepentingan publik.

f. Realisasi APBD (Y)

Tabel 4.20
Rincian kebijakan pelaksanaan yang dituangkan secara tertulis dan dapat menjadi pedoman bagi yang menerima pelimpahan wewenang atasan.
Pernyataan Y.1

| | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|--------------------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid Tidak Setuju | 5 | 15.2 | 15.2 | 15.2 |
| Ragu-Ragu | 12 | 36.4 | 36.4 | 51.5 |
| Setuju | 16 | 48.5 | 48.5 | 100.0 |
| Total | 33 | 100.0 | 100.0 | |

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0, Data, Diolah Penulis (2019)

Berdasarkan tabel 4.20 di atas, didapat data bahwa yang menyatakan setuju sebanyak 16 orang (48.5%), ragu-ragu sebanyak 12 orang (36.4%), dan sebanyak 5 orang (15.2%) responden yang menyatakan tidak setuju. Dari jawaban responden paling banyak adalah yang menyatakan setuju sebanyak 16 orang (48.5%). Jadi dapat disimpulkan responden setuju bahwa rincian kebijakan pelaksanaan yang dituangkan secara tertulis dan dapat menjadi pedoman bagi yang menerima pelimpahan wewenang atasan.

Tabel 4.21
Rencana kerja yang menggambarkan kegiatan yang harus dilaksanakan.
Pernyataan Y.2

| | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|--------------------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid Tidak Setuju | 10 | 30.3 | 30.3 | 30.3 |
| Ragu-Ragu | 8 | 24.2 | 24.2 | 54.5 |
| Setuju | 11 | 33.3 | 33.3 | 87.9 |
| Sangat Setuju | 4 | 12.1 | 12.1 | 100.0 |
| Total | 33 | 100.0 | 100.0 | |

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0, Data, Diolah Penulis (2019)

Berdasarkan tabel 4.21 di atas, didapat data bahwa yang menyatakan sangat setuju sebanyak 4 orang (12.1%), setuju sebanyak 11 orang (33.3%), ragu-ragu sebanyak 8 orang (24.2%), dan sebanyak 10 orang (30.3%) responden yang menyatakan tidak setuju. Dari jawaban responden paling banyak adalah yang menyatakan setuju sebanyak 11 orang (33.3%). Jadi dapat disimpulkan responden setuju bahwa rencana kerja yang menggambarkan kegiatan yang harus dilaksanakan.

Tabel 4.22
Prosedur kerja yang merupakan petunjuk pelaksanaan yang jelas.
Pernyataan Y.3

| | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|--------------------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid Tidak Setuju | 7 | 21.2 | 21.2 | 21.2 |
| Ragu-Ragu | 11 | 33.3 | 33.3 | 54.5 |
| Setuju | 8 | 24.2 | 24.2 | 78.8 |
| Sangat Setuju | 7 | 21.2 | 21.2 | 100.0 |
| Total | 33 | 100.0 | 100.0 | |

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0, Data, Diolah Penulis (2019)

Berdasarkan tabel 4.22 di atas, didapat data bahwa yang menyatakan sangat setuju sebanyak 7 orang (21.2%), setuju sebanyak 8 orang (24.2%), ragu-ragu sebanyak 11 orang (33.3%) dan sebanyak 7 orang (21.2%) responden yang menyatakan tidak setuju. Dari jawaban responden paling banyak adalah yang menyatakan ragu-ragu sebanyak 11 orang (33.3%). Jadi dapat disimpulkan responden ragu-ragu bahwa prosedur kerja yang merupakan petunjuk pelaksanaan yang jelas.

3. Uji Kualitas Data

a. Pengujian Validitas

Untuk mengetahui kelayakan butir-butir dalam daftar angket yang telah disajikan pada responden maka perlu dilakukan uji validitas. Apabila validitas setiap pertanyaan lebih besar ($>$) 0,30, maka butir pertanyaan dianggap valid.

Tabel 4.23
Uji Validitas (X₁) Transparansi
Item-Total Statistics

| | Scale Mean if Item Deleted | Scale Variance if Item Deleted | Corrected Item-Total Correlation | Cronbach's Alpha if Item Deleted |
|-----------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Pernyataan X1.1 | 12.7273 | 8.705 | .476 | .821 |
| Pernyataan X1.2 | 12.5758 | 7.314 | .643 | .775 |
| Pernyataan X1.3 | 12.7879 | 7.735 | .655 | .770 |
| Pernyataan X1.4 | 12.4848 | 8.383 | .619 | .782 |
| Pernyataan X1.5 | 12.8182 | 8.028 | .679 | .765 |

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0, Data, Diolah Penulis (2019)

Dari tabel 4.23 di atas hasil *output* SPSS diketahui nilai validitas terdapat pada kolom *Corrected Item-Total Correlation* yang artinya nilai korelasi antara skor setiap butir dengan skor total pada tabulasi jawaban responden. Hasil uji validitas dari 5 (lima) butir pertanyaan pada variabel transparansi dapat dinyatakan valid (sah) karena semua nilai koefisien lebih besar dari 0,30.

Tabel 4.24
Uji Validitas (X₂) Akuntabel
Item-Total Statistics

| | Scale Mean if Item Deleted | Scale Variance if Item Deleted | Corrected Item-Total Correlation | Cronbach's Alpha if Item Deleted |
|-----------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Pernyataan X2.1 | 13.2121 | 5.610 | .364 | .770 |
| Pernyataan X2.2 | 13.4242 | 4.502 | .703 | .657 |
| Pernyataan X2.3 | 13.6970 | 5.405 | .471 | .739 |
| Pernyataan X2.4 | 13.3636 | 4.614 | .542 | .715 |
| Pernyataan X2.5 | 13.2121 | 4.297 | .596 | .695 |

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0, Data, Diolah Penulis (2019)

Dari tabel 4.24 di atas hasil *output* SPSS diketahui nilai validitas terdapat pada kolom *Corrected Item-Total Correlation* yang artinya nilai korelasi antara skor setiap butir dengan skor total pada tabulasi jawaban responden. Hasil uji validitas dari 5 (lima) butir pertanyaan pada variabel akuntabel dapat dinyatakan valid (sah) karena semua nilai koefisien lebih besar dari 0,30.

Tabel 4.25
Uji Validitas (X₃) Ekonomis
Item-Total Statistics

| | Scale Mean if Item Deleted | Scale Variance if Item Deleted | Corrected Item-Total Correlation | Cronbach's Alpha if Item Deleted |
|-----------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Pernyataan X3.1 | 7.7576 | 5.939 | .515 | .631 |
| Pernyataan X3.2 | 7.9394 | 4.184 | .552 | .538 |
| Pernyataan X3.3 | 7.6970 | 3.968 | .509 | .615 |

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0, Data, Diolah Penulis (2019)

Dari tabel 4.25 di atas hasil *output* SPSS diketahui nilai validitas terdapat pada kolom *Corrected Item-Total Correlation* yang artinya nilai korelasi antara skor setiap butir dengan skor total pada tabulasi jawaban responden. Hasil uji

validitas dari 3 (tiga) butir pertanyaan pada variabel ekonomis dapat dinyatakan valid (sah) karena semua nilai koefisien lebih besar dari 0,30.

Tabel 4.26
Uji Validitas (X₄) Efektif
Item-Total Statistics

| | Scale Mean if Item Deleted | Scale Variance if Item Deleted | Corrected Item-Total Correlation | Cronbach's Alpha if Item Deleted |
|-----------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Pernyataan X4.1 | 6.3030 | 1.655 | .614 | .481 |
| Pernyataan X4.2 | 6.7576 | 2.939 | .315 | .816 |
| Pernyataan X4.3 | 6.6364 | 1.739 | .678 | .386 |

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0, Data, Diolah Penulis (2019)

Dari tabel 4.26 di atas hasil *output* SPSS diketahui nilai validitas terdapat pada kolom *Corrected Item-Total Correlation* yang artinya nilai korelasi antara skor setiap butir dengan skor total pada tabulasi jawaban responden. Hasil uji validitas dari 3 (tiga) butir pertanyaan pada variabel efektif dapat dinyatakan valid (sah) karena semua nilai koefisien lebih besar dari 0,30.

Tabel 4.27
Uji Validitas (X₅) Efisien
Item-Total Statistics

| | Scale Mean if Item Deleted | Scale Variance if Item Deleted | Corrected Item-Total Correlation | Cronbach's Alpha if Item Deleted |
|-----------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Pernyataan X5.1 | 7.2121 | 1.985 | .525 | .418 |
| Pernyataan X5.2 | 7.0000 | 2.875 | .442 | .557 |
| Pernyataan X5.3 | 7.3030 | 2.530 | .394 | .611 |

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0, Data, Diolah Penulis (2019)

Dari tabel 4.27 di atas hasil *output* SPSS diketahui nilai validitas terdapat pada kolom *Corrected Item-Total Correlation* yang artinya nilai korelasi antara skor setiap butir dengan skor total pada tabulasi jawaban responden. Hasil uji validitas dari 3 (tiga) butir pertanyaan pada variabel efisien dapat dinyatakan valid (sah) karena semua nilai koefisien lebih besar dari 0,30.

Tabel 4.28
Uji Validitas (Y) Realisasi APBD
Item-Total Statistics

| | Scale Mean if Item Deleted | Scale Variance if Item Deleted | Corrected Item-Total Correlation | Cronbach's Alpha if Item Deleted |
|----------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Pernyataan Y.1 | 6.7273 | 3.392 | .553 | .697 |
| Pernyataan Y.2 | 6.7879 | 2.360 | .625 | .583 |
| Pernyataan Y.3 | 6.6061 | 2.434 | .563 | .668 |

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0, Data, Diolah Penulis (2019)

Dari tabel 4.28 di atas hasil *output* SPSS diketahui nilai validitas terdapat pada kolom *Corrected Item-Total Correlation* yang artinya nilai korelasi antara skor setiap butir dengan skor total pada tabulasi jawaban responden. Hasil uji validitas dari 3 (lima) butir pertanyaan pada variabel realisasi apbd dapat dinyatakan valid (sah) karena semua nilai koefisien lebih besar dari 0,30.

b. Pengujian Reliabilitas

Angket dikatakan reliabel jika *alpha cronbach* $> 0,60$ dan tidak reliabel jika sama dengan atau dibawah 0,60.

Tabel 4.29
Uji Reliabilitas (X₁) Transparansi
Reliability Statistics

| Cronbach's Alpha | N of Items |
|------------------|------------|
| .819 | 5 |

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0, Data, Diolah Penulis (2019)

Dari tabel 4.29 di atas, hasil *output* SPSS diketahui nilai *Cronbach's Alpha* sebesar $0,819 > 0,60$ sehingga dapat disimpulkan bahwa pertanyaan yang telah disajikan kepada responden yang terdiri dari 5 butir pernyataan pada variabel transparansi adalah reliabel atau dikatakan handal.

Tabel 4.30
 Uji Reliabilitas (X₂) **Akuntabel**
Reliability Statistics

| Cronbach's Alpha | N of Items |
|------------------|------------|
| .762 | 5 |

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0, Data, Diolah Penulis (2019)

Dari tabel 4.30 di atas, hasil *output* SPSS diketahui nilai *Cronbach's Alpha* sebesar $0,762 > 0,60$ sehingga dapat disimpulkan bahwa pertanyaan yang telah disajikan kepada responden yang terdiri dari 5 butir pernyataan pada variabel akuntabel adalah reliabel atau dikatakan handal.

Tabel 4.31
 Uji Reliabilitas (X₃) **Ekonomis**
Reliability Statistics

| Cronbach's Alpha | N of Items |
|------------------|------------|
| .691 | 3 |

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0, Data, Diolah Penulis (2019)

Dari tabel 4.31 di atas, hasil *output* SPSS diketahui nilai *Cronbach's Alpha* sebesar $0,619 > 0,60$ sehingga dapat disimpulkan bahwa pertanyaan yang telah disajikan kepada responden yang terdiri dari 3 butir pernyataan pada variabel ekonomis adalah reliabel atau dikatakan handal.

Tabel 4.32
 Uji Reliabilitas (X₄) **Efektif**
Reliability Statistics

| Cronbach's Alpha | N of Items |
|------------------|------------|
| .701 | 3 |

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0, Data, Diolah Penulis (2019)

Dari tabel 4.32 di atas, hasil *output* SPSS diketahui nilai *Cronbach's Alpha* sebesar $0,701 > 0,60$ sehingga dapat disimpulkan bahwa pertanyaan yang telah disajikan kepada responden yang terdiri dari 3 butir pernyataan pada variabel efektif adalah reliabel atau dikatakan handal.

Tabel 4.33
Uji Reliabilitas (X₅) Efisien
Reliability Statistics

| Cronbach's Alpha | N of Items |
|------------------|------------|
| .636 | 3 |

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0, Data, Diolah Penulis (2019)

Dari tabel 4.33 di atas, hasil *output* SPSS diketahui nilai *Cronbach's Alpha* sebesar $0,636 > 0,60$ sehingga dapat disimpulkan bahwa pertanyaan yang telah disajikan kepada responden yang terdiri dari 3 butir pernyataan pada variabel efisien adalah reliabel atau dikatakan handal.

Tabel 4.34
Uji Reliabilitas (Y) Realisasi APBD
Reliability Statistics

| Cronbach's Alpha | N of Items |
|------------------|------------|
| .740 | 3 |

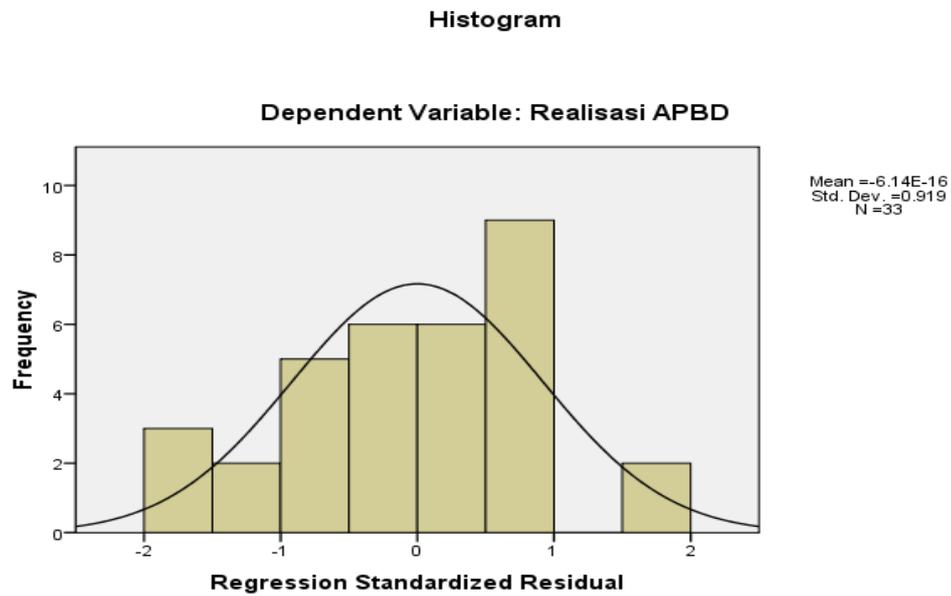
Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0, Data, Diolah Penulis (2019)

Dari tabel 4.34 di atas, hasil *output* SPSS diketahui nilai *Cronbach's Alpha* sebesar $0,740 > 0,60$ sehingga dapat disimpulkan bahwa pertanyaan yang telah disajikan kepada responden yang terdiri dari 3 butir pernyataan pada variabel realisasi apbd adalah reliabel atau dikatakan handal.

4. Pengujian Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas data

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel peganggu atau residual memiliki distribusi normal. Model regresi yang baik distribusi data normal atau mendekati normal.

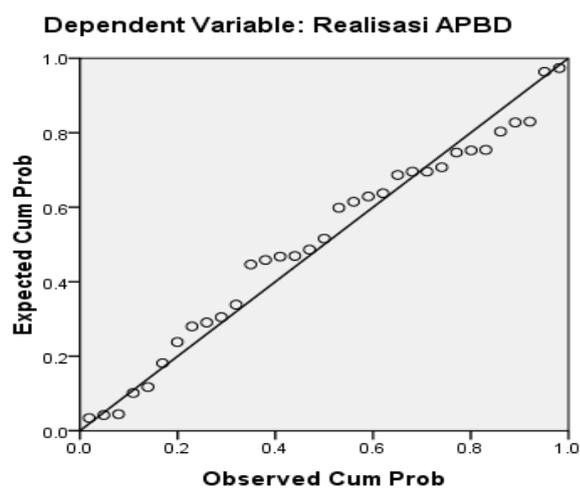


Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0, Data, Diolah Penulis (2019)

Gambar 4.2 Histogram Uji Normalitas

Berdasarkan Gambar 4.2 di atas, hasil pengujian normalitas data diketahui bahwa data telah berdistribusi secara normal, dimana gambar histogram memiliki garis membentuk lonceng dan memiliki kecembungan seimbang ditengah.

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0, Data, Diolah Penulis (2019)

Gambar 4.3 PP Plot Uji Normalitas

Berdasarkan Gambar 4.3 di atas, kemudian untuk hasil pengujian normalitas data dengan menggunakan gambar PP Plot terlihat titik-titik data yang menyebar berada di sekitar garis diagonal sehingga data telah berdistribusi secara normal.

Dari kedua gambar di atas, maka dapat disimpulkan bahwa setelah dilakukan uji normalitas data, data untuk variabel transparansi, akuntabel, ekonomis, efektif dan efisien terhadap realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah berdistribusi secara normal.

Untuk lebih memastikan apakah data disepanjang garis diagonal tersebut berdistribusi normal atau tidak, maka dilakukan uji Kolmogorov Smirnov (1 Sample KS) yakni dengan melihat data residualnya apakah distribusi normal atau tidak. Jika nilai *Asym.sig (2-tailed)* > taraf nyata ($\alpha = 0.05$) maka data residual berdistribusi normal.

Tabel 4.35
Uji Normalitas One Sample Kolmogorov Smirnov Test
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

| | | Unstandardized Residual |
|---------------------------------|----------------|-------------------------|
| N | | 33 |
| Normal Parameters ^a | Mean | .0000000 |
| | Std. Deviation | .70828564 |
| Most Extreme Differences | Absolute | .108 |
| | Positive | .089 |
| | Negative | -.108 |
| Kolmogorov-Smirnov Z | | .622 |
| Asymp. Sig. (2-tailed) | | .834 |
| a. Test distribution is Normal. | | |
| | | |

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0 (2019)

Pada tabel 4.35 di atas, dapat dilihat bahwa hasil pengolahan data tersebut, besar nilai signifikansi *kolmogorov Smirnov* sebesar 0,834 maka dapat disimpulkan

data terdistribusi secara normal, dimana nilai signifikasinya lebih besar dari 0,05 ($p= 0,834 > 0,05$).

b. Uji Multikolinearitas

Ketentuan untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinieritas yaitu jika nilai *variance inflation factor* (VIF) tidak lebih dari 10 dan nilai tolerance tidak kurang dari 0,1, maka model dapat dikatakan terbebas dari multikolinieritas. *Variance Inflation Factor* (VIF) = $1/\text{Tolerance}$, jika VIF = 0 maka $1/10 = 0.1$.

Uji Multikolinieritas dari hasil angket yang telah didistribusikan kepada responden dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.36
Uji Multikolinieritas
Coefficients^a

| Model | | Unstandardized Coefficients | | T | Sig. | Collinearity Statistics | |
|-------|--------------|-----------------------------|------------|--------|------|-------------------------|-------|
| | | B | Std. Error | | | Tolerance | VIF |
| 1 | (Constant) | -3.264 | .997 | -3.272 | .003 | | |
| | Transparansi | .365 | .069 | 5.296 | .000 | .325 | 3.074 |
| | Akuntabel | .331 | .108 | 3.064 | .005 | .221 | 4.517 |
| | Ekonomis | .027 | .060 | 3.448 | .048 | .564 | 1.773 |
| | Efektif | .114 | .140 | 3.814 | .023 | .230 | 4.355 |
| | Efisien | .111 | .068 | 3.638 | .013 | .858 | 1.166 |

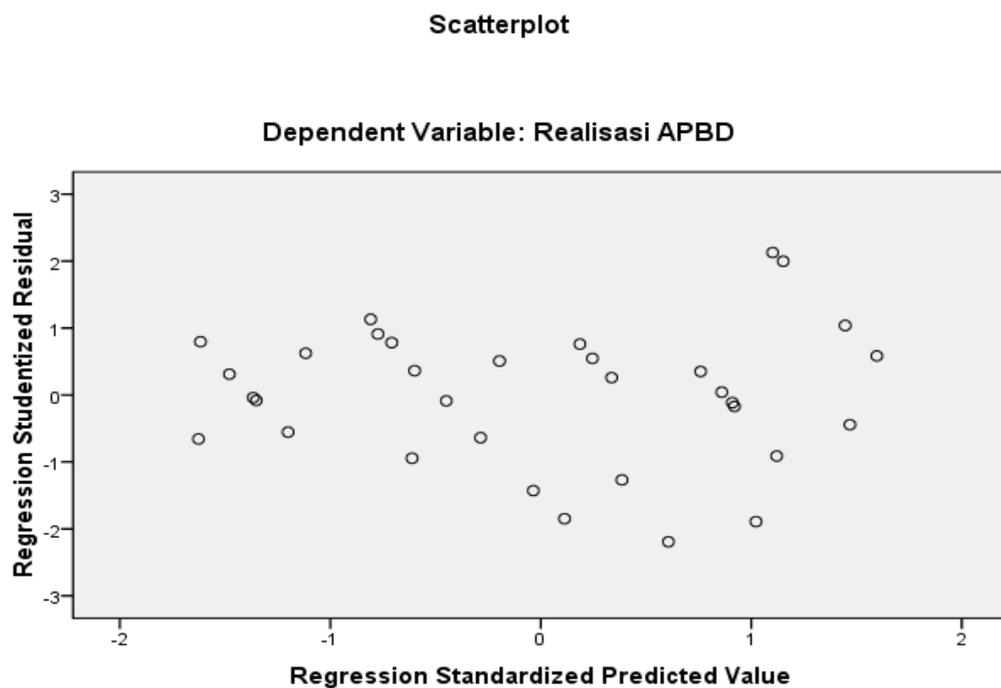
a. Dependent Variable: Realisasi APBD

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0, Data, Diolah Penulis (2019)

Berdasarkan tabel 4.36 di atas dapat dilihat bahwa angka *Variance Inflation Factor* (VIF) lebih kecil dari 10 antara lain adalah transparansi $3,074 < 10$, akuntabel $4,517 < 10$, ekonomis $1,773 < 10$, efektif $4,355 < 10$ dan efisien $1,166 < 10$, serta nilai *Tolerance* transparansi $0,325 > 0,10$, akuntabel $0,221 > 0,10$, ekonomis $0,564 > 0,10$, efektif $0,230 > 0,10$ dan efisien $0,858 > 0,10$ sehingga terbebas dari multikolinieritas.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke-pengamatan lain jika variance dari residual satu pengamatan ke-pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heterokedastisitas.



Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0, Data, Diolah Penulis (2019)

Gambar 4.4 *Scatterplot* Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan gambar 4.4 di atas, gambar *scatterplot* menunjukkan bahwa titik-titik yang dihasilkan menyebar secara acak dan tidak membentuk suatu pola atau trend garis tertentu. Gambar di atas juga menunjukkan bahwa sebaran data ada di sekitar titik nol. Dari hasil pengujian ini menunjukkan bahwa model regresi ini bebas dari masalah heteroskedastisitas, dengan perkataan lain: variabel-variabel yang akan diuji dalam penelitian ini bersifat homoskedastisitas.

5. Pengujian Hipotesis

a. Regresi Linier Berganda

Model Regresi Linear Berganda (*Multiple Regression Analysis*), bertujuan untuk menguji pengaruh antara satu variabel terhadap variabel lain. Regresi linear berganda melibatkan lebih dari satu variabel bebas (Independen). Rumus analisis regresi berganda sebagai berikut:

Tabel 4.37
Regresi Linier Berganda
Coefficients^a

| Model | | Unstandardized Coefficients | | T | Sig. | Collinearity Statistics | |
|-------|---------------------|-----------------------------|------------|--------|------|-------------------------|-------|
| | | B | Std. Error | | | Tolerance | VIF |
| 1 | (Constant) | -3.264 | .997 | -3.272 | .003 | | |
| | Transparansi | .365 | .069 | 5.296 | .000 | .325 | 3.074 |
| | Akuntabel | .331 | .108 | 3.064 | .005 | .221 | 4.517 |
| | Ekonomis | .027 | .060 | 3.448 | .048 | .564 | 1.773 |
| | Efektif | .114 | .140 | 3.814 | .023 | .230 | 4.355 |
| | Efisien | .111 | .068 | 3.638 | .013 | .858 | 1.166 |

a. Dependent Variable: Realisasi APBD

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0, Data, Diolah Penulis (2019)

Berdasarkan tabel 4.37 tersebut diperoleh regresi linier berganda sebagai berikut $Y = -3,264 + 0,365 X_1 + 0,331 X_2 + 0,027 X_3 + 0,114 X_4 + 0,111 X_5$

Interpretasi dari persamaan regresi linier berganda adalah:

- Jika segala sesuatu pada variabel-variabel bebas dianggap nol maka nilai realisasi APBD (Y) adalah sebesar -3,264 satuan.
- Jika terjadi peningkatan transparansi 1, maka realisasi APBD (Y) akan meningkat sebesar 0,365 satuan.
- Jika terjadi peningkatan akuntabel sebesar 1, maka realisasi APBD (Y) akan meningkat sebesar 0,331 satuan.

- d. Jika terjadi peningkatan ekonomis sebesar 1, maka realisasi APBD (Y) akan meningkat sebesar 0,027 satuan.
- e. Jika terjadi peningkatan efektif sebesar 1, maka realisasi APBD (Y) akan meningkat sebesar 0,114 satuan.
- f. Jika terjadi peningkatan efisien sebesar 1, maka realisasi APBD (Y) akan meningkat sebesar 0,111 satuan.

b. Uji Signifikan Parsial (Uji t)

Uji Signifikan Parsial (Uji-t) digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen, apakah pengaruhnya signifikan atau tidak.

Tabel 4.38
Uji Parsial
Coefficients^a

| Model | | Unstandardized Coefficients | | t | Sig. | Collinearity Statistics | |
|-------|---------------------|-----------------------------|------------|--------------|-------------|-------------------------|-------|
| | | B | Std. Error | | | Tolerance | VIF |
| 1 | (Constant) | -3.264 | .997 | -3.272 | .003 | | |
| | Transparansi | .365 | .069 | 5.296 | .000 | .325 | 3.074 |
| | Akuntabel | .331 | .108 | 3.064 | .005 | .221 | 4.517 |
| | Ekonomis | .027 | .060 | 3.448 | .048 | .564 | 1.773 |
| | Efektif | .114 | .140 | 3.814 | .023 | .230 | 4.355 |
| | Efisien | .111 | .068 | 3.638 | .013 | .858 | 1.166 |

a. Dependent Variable: Realisasi APBD

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0, Data, Diolah Penulis (2019)

Berdasarkan tabel 4.38 diatas dapat dilihat bahwa:

- 1) Pengaruh transparansi terhadap realisasi APBD.

$t_{hitung} 5,296 > t_{tabel} 2,051$ dan signifikan $0,000 < 0,05$, maka H_a diterima dan H_0 ditolak, yang menyatakan transparansi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap realisasi APBD.

2) Pengaruh akuntabel terhadap realisasi APBD.

$t_{hitung} 3,064 > t_{tabel} 2,051$ dan signifikan $0,005 < 0,05$, maka H_a diterima dan H_0 ditolak, yang menyatakan akuntabel secara parsial berpengaruh signifikan terhadap realisasi APBD.

3) Pengaruh ekonomis terhadap realisasi APBD.

$t_{hitung} 3,448 > t_{tabel} 2,051$ dan signifikan $0,048 < 0,05$, maka H_a diterima dan H_0 ditolak, yang menyatakan ekonomis secara parsial berpengaruh signifikan terhadap realisasi APBD.

4) Pengaruh efektif terhadap realisasi APBD.

$t_{hitung} 3,814 > t_{tabel} 2,051$ dan signifikan $0,023 < 0,05$, maka H_a diterima dan H_0 ditolak, yang menyatakan efektif secara parsial berpengaruh signifikan terhadap realisasi APBD.

5) Pengaruh efisien terhadap realisasi APBD.

$t_{hitung} 3,638 > t_{tabel} 2,051$ dan signifikan $0,013 < 0,05$, maka H_a diterima dan H_0 ditolak, yang menyatakan efisien secara parsial berpengaruh signifikan terhadap realisasi APBD.

c. Uji Signifikan Simultan (Uji F)

Uji signifikan (Uji-F) pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau terikat. Cara yang digunakan adalah dengan melihat *level of significant* ($=0,05$). Jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka H_0 ditolak dan H_a diterima.

Tabel 4.39
Uji Simultan
ANOVA^b

| Model | | Sum of Squares | df | Mean Square | F | Sig. |
|-------|------------|----------------|----|-------------|---------------|-------------------------|
| 1 | Regression | 157.825 | 5 | 31.565 | 53.089 | .000^a |
| | Residual | 16.053 | 27 | .595 | | |
| | Total | 173.879 | 32 | | | |

a. Predictors: (Constant), Efisien, Efektif, Ekonomis, Transparansi, Akuntabel

b. Dependent Variable: Realisasi APBD

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0, Data, Diolah Penulis (2019)

Berdasarkan tabel 4.39 di atas dapat dilihat bahwa F_{hitung} sebesar 53,089 sedangkan F_{tabel} sebesar 2,57 yang dapat dilihat pada $\alpha = 0,05$ (lihat lampiran tabel F). Probabilitas signifikan jauh lebih kecil dari 0,05 yaitu $0,000 < 0,05$, maka model regresi dapat dikatakan bahwa dalam penelitian ini transparansi, akuntabel, ekonomis, efektif dan efisien secara simultan berpengaruh signifikan terhadap realisasi APBD. Maka hipotesis sebelumnya adalah Terima H_a (tolak H_0) atau hipotesis diterima.

d. Koefisien Determinasi

Uji Koefisien Determinasi (R^2) digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel independen menjelaskan variabel dependen. Koefisien determinasi terletak pada tabel summary dan tertulis *R Square* yang disesuaikan atau tertulis *Adjusted R Square* yang disesuaikan atau tertulis *Adjusted R Square*, karena disesuaikan dengan jumlah *Square* variabel independen yang digunakan dalam penelitian.

Tabel 4.40
Koefisien Determinasi
Model Summary^b

| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
|-------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|
| 1 | .953 ^a | .908 | .891 | .77108 |

a. Predictors: (Constant), Efisien, Efektif, Ekonomis, Transparansi, Akuntabel

b. Dependent Variable: Realisasi APBD

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0, Data, Diolah Penulis (2019)

Berdasarkan tabel 4.40 di atas dapat dilihat bahwa angka *Adjusted R Square* 0,891 yang dapat disebut koefisien determinasi yang dalam hal ini berarti 89,1% realisasi APBD dapat diperoleh dan dijelaskan oleh transparansi, akuntabel, ekonomis, efektif dan efisien. Sedangkan sisanya $100\% - 89,1\% = 10,9\%$ dijelaskan oleh faktor lain atau variabel diluar model, seperti partisipasi masyarakat, kebijakan publik, pengetahuan dewan tentang anggaran dan lain-lain.

B. Pembahasan

1. Pengaruh Transparansi Secara Parsial Terhadap Realisasi APBD

Hasil menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap realisasi APBD. Hal penelitian ini sesuai dengan penelitian Saridewi (2015), Oktasari (2016), Mukarif (2013), Muljo (2014) dan Setiyanningrum (2017), yang menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap realisasi APBD. Menurut Mardiasmo (2011) “Transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas, seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat di mengerti dan dipantau”. Transparansi bermakna tersedianya informasi yang cukup, akurat dan tepat waktu tentang kebijakan publik, dan proses pembentukannya. Informasi adalah suatu

kebutuhan penting masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan daerah. Dengan ketersediaan informasi, masyarakat dapat ikut sekaligus mengawasi sehingga kebijakan publik yang muncul bisa memberikan hasil yang optimal bagi masyarakat, serta mencegah terjadinya kecurangan dan manipulasi yang hanya akan menguntungkan salah satu kelompok masyarakat saja secara tidak proporsional.

2. Pengaruh Akuntabel Secara Parsial Terhadap Realisasi APBD

Hasil menunjukkan bahwa akuntabel berpengaruh positif dan signifikan terhadap realisasi APBD. Hal penelitian ini sesuai dengan penelitian Saridewi (2015), Oktasari (2016), Mukarif (2013), Muljo (2014) dan Setiyanningrum (2017), yang menunjukkan bahwa akuntabel berpengaruh positif dan signifikan terhadap realisasi APBD. Menurut Mardiasmo (2011), akuntabilitas mencakup eksistensi dari suatu mekanisme yang meyakinkan politisi dan pejabat pemerintahan terhadap aksi perbuatannya dalam penggunaan sumber-sumber publik dan kinerja prilakunya. Akuntabilitas juga berkaitan erat dengan pertanggungjawaban terhadap efektivitas kegiatan dalam pencapaian sasaran atau target kebijaksanaan atau program.

3. Pengaruh Ekonomis Secara Parsial Terhadap Realisasi APBD

Hasil menunjukkan bahwa ekonomis berpengaruh positif dan signifikan terhadap realisasi APBD. Hal penelitian ini sesuai dengan penelitian Saridewi (2015), Oktasari (2016), Mukarif (2013), Muljo (2014) dan Setiyanningrum (2017), yang menunjukkan bahwa ekonomis berpengaruh positif dan signifikan

terhadap realisasi APBD. Menurut Renyowijoyo (2008), “ekonomi merupakan perolehan masukan (input) dengan kualitas dan kuantitas tertentu dengan harga terendah. Ekonomi merupakan perbandingan antara masukan (yang terjadi) dengan nilai masukan (yang seharusnya). Ekonomi terkait dengan sejauh mana organisasi sektor publik dapat meminimalisir sumber daya yang digunakan, dengan menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif”.

4. Pengaruh Efektif Secara Parsial Terhadap Realisasi APBD

Hasil menunjukkan bahwa efektif berpengaruh positif dan signifikan terhadap realisasi APBD. Hal penelitian ini sesuai dengan penelitian Saridewi (2015), Oktasari (2016), Mukarif (2013), Muljo (2014) dan Setiyanningrum (2017), yang menunjukkan bahwa efektif berpengaruh positif dan signifikan terhadap realisasi APBD. Renyowijoyo (2008), “efektifitas merupakan tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Secara sederhana efektifitas merupakan perbandingan outcome dengan output. Ketiga hal tersebut merupakan elemen pokok *value for money*, sedang tambahannya dua elemen lain yaitu keadilan (*equity*) dan pemerataan atau kesetaraan (*equality*). Keadilan mengacu pada adanya kesempatan social (*social opportunity*) yang sama untuk mendapatkan pelayanan public yang berkualitas dan kesejahteraan ekonomi. Selain keadilan perlu dilakukan distribusi secara merata (*equality*). Penggunaan dana publik hendaknya tidak hanya terkonsentrasi pada kelompok tertentu saja, melainkan dilakukan secara merata”.

5. Pengaruh Efisien Secara Parsial Terhadap Realisasi APBD

Hasil menunjukkan bahwa efisien berpengaruh positif dan signifikan terhadap realisasi APBD. Hal penelitian ini sesuai dengan penelitian Saridewi (2015), Oktasari (2016), Mukarif (2013), Muljo (2014) dan Setiyanningrum (2017), yang menunjukkan bahwa efisien berpengaruh positif dan signifikan terhadap realisasi APBD. Renyowijoyo (2008), “efisiensi merupakan pencapaian keluaran (output) yang maksimum dengan masukan tertentu dengan penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu. Efisiensi merupakan perbandingan keluaran/masukan (output/input) yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan”.

6. Pengaruh Transparansi, Akuntabel, Ekonomis, Efektif Dan Efisien Secara Simultan Terhadap Realisasi APBD

Hasil menunjukkan bahwa transparansi, akuntabel, ekonomis, efektif dan efisien secara simultan berpengaruh signifikan terhadap realisasi APBD. Maka hipotesis sebelumnya adalah Terima H_a (tolak H_0) atau hipotesis diterima. Hal penelitian ini sesuai dengan penelitian Saridewi (2015), Oktasari (2016), Mukarif (2013), Muljo (2014) dan Setiyanningrum (2017), yang menunjukkan bahwa efisien berpengaruh positif dan signifikan terhadap realisasi APBD. Agar kegiatan pengelolaan APBD dapat berjalan dengan ekonomis, efisien, dan efektif pihak pemegang amanah pengelolaan keuangan harus dilakukan secara akuntabilitas. Akuntabilitas pengelolaan APBD dapat dilihat dari kewajiban pemerintah daerah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan dan melaporkan segala aktifitas dan kegiatan yang terkait dengan menggunakan uang publik, kepada

pihak yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (DPRD), Aspek penting dalam akuntabilitas pengelolaan APBD adalah aspek legalitas yaitu setiap transaksi pengeluaran yang dilakukan harus dapat dilacak otoritas legalnya dan aspek pengelolaan atas pengeluaran Negara yang baik, perlindungan asset fisik dan financial, mencegah terjadinya pemborosan dan salah urus. Maka dengan demikian semakin baik dan buruk akuntabilitas publik, maka semakin tinggi atau semakin rendah pengelolaan APBD.

Selain latar belakang akuntabilitas publik, latar belakang transparansi publik juga dapat mempengaruhi pengelolaan APBD. Transparansi publik merupakan prasyarat untuk terjadinya partisipasi masyarakat. Transparansi pengelolaan APBD sangat penting karena terciptanya keterbukaan (*transparency*) informasi bagi publik dapat berdampak positif bagi kehidupan sosial dan ekonomi, serta menjadi salah satu penunjang kontrol masyarakat atas kinerja pemerintah.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan di atas. Maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Transparansi, akuntabel, ekonomis, efektif dan efisien secara parsial berpengaruh signifikan terhadap realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan.
2. Transparansi, akuntabel, ekonomis, efektif dan efisien secara simultan berpengaruh signifikan terhadap realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dimukakan diatas, maka dapat disebutkan beberapa saran, yaitu:

1. Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan harus melakukan transparansi anggaran. Sehingga masyarakat mampu mengawasi pelaksanaan anggaran daerah.
2. Kajian tentang laporan keuangan daerah dapat dipublikasikan ke masyarakat. Sehingga masyarakat mengetahui dengan jelas tentang kondisi keuangan Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan.

3. Bagi Peneliti selanjutnya dapat menambahkan variabel bebas lain, sehingga diharapkan dapat memberikan hasil penelitian yang lebih baik, lengkap, dan bermanfaat.

DAFTAR PUSTAKA

- Chrisna, H. (2019). Analisis Kesiapan Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi & Bisnis Unpab Dalam Konvergensi IFRS (*International Financial Reporting Standard*). *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 7(2), 1-11.
- Dwilita, H. (2019). Perbandingan Kinerja Perbankan Indonesia Studi Pada Bank Umum Konvensional Dan Bank Umum Syariah Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2008-2017. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 10(1), 145-162.
- Erlina, Sri Mulyani, 2009. *Metodologi Penelitian Bisnis : Untuk Akuntansi dan Manajemen*, Cetakan Pertama, USU Press, Medan.
- Fadly, Y. (2015). Kondisi dan Kritik Sosial pada Masa Rezim Orde Baru dalam Puisi-Puisi WS Rendra.
- Halim, Abdul. (2013). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Ketiga, Salemba Empat: Jakarta.
- Maisyarah, R., & Sofyardi, M. (2018, January). *The Effect of Rice Subsidyon The Expenditure of Public Family Consumption And Welfare of Poor Households. In 1st Economics and Business International Conference 2017 (EBIC 2017)*. Atlantis Press.
- Mardiasmo, 2011, *Akuntansi Sektor Publik* , Jogjakarta YKPN.
- Maryono, Werella, Kismartini, *Implementasi Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Propinsi Jawa Tengah*, Dialogue JIAKP, Vol. 4, No. Januari 2007 : 69 – 78.
- Mukarif, Jaenal. (2013). Analisis kinerja anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kota Surakarta melalui Pendekatan Value For Mone (Tahun Anggaran 2009-2011).
- Muljo, Hery Harjono. (2014). Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Realisasi APBD.
- Mursyidi, 2009 *Akuntansi Pemerintahan di Indonesia*, Refika Aditama Bandung
- Nasution, A. P. (2018). Pengaruh *Independence In Fact & Independence In Appearance* Dalam Mempertahankan Sikap Independensi Pada Internal Auditor Badan Pengawas Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 8(1), 154-164.

- Nasution, A. P. (2019). Dampak Pengetahuan Pajak Dan Kualitas Pelayanan Petugas Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (STUDI KASUS: KPP PRATAMA BINJAI). *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 7(2), 207-224.
- Nasution, D. A. D. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Pengguna Sistem Informasi Manajemen Daerah-Kuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 10(1), 101-114.
- Nasution, N. A. (2019). Tata cara pelaporan pajak terhutang surat pemberitahuan masa terhadap pajak pertambahan nilai pada Cv. Bina rekayasa. *Jurnal Perpajakan*, 1(1), 37-53.
- Nordiawan, Putra, Rahmawati, 2008, *Akuntansi Pemerintahan*, Selemba Empat Jakarta.
- Oktasari, Rosy. (2016). Pengaruh Akuntabilitas Publik, Partisipasi Masyarakat, Transparansi Kebijakan Publik, Dan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) di DPRD Kabupaten Karanganyar.
- Panggabean, F. Y. (2019). Kinerja Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dan Kota Di Sumatera Utara Berdasarkan Opini Audit. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis: Jurnal Program studi Akuntansi*, 5(2), 151-159.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.
- Renyowijoyo Muindro, 2008, *Akuntansi Sektor Publik Organisasi Non Laba*, Mitra Wacana Media Jakarta.
- Rizkina, M. (2019). Pengaruh Efektivitas Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) Terhadap Pendapatan Asli Daerah Dengan Jumlah Penduduk Sebagai Variabel Moderating. *JURNAL PERPAJAKAN*, 1(1), 80-94.
- Sari, P. B., & Dwilita, H. (2018). Prospek Financial Technology (*Fintech*) Di Sumatera Utara Dilihat Dari Sisi Literasi Keuangan, Inklusi Keuangan Dan Kemiskinan. *Kajian Akuntansi*, 19(1), 09-18.
- Saridewi, Anak Agung Ayu Nitya. (2015). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Studi Kasus : Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kota Denpasar Tahun 2013).

- Setiawan, A., Rini, E. S., Sadalia, I., & Daulay, M. T. (2019). 3. Analysis of Murabahah Financing Marketing Strategy at PT BPRS Amanah Insan Cita, Medan, North Sumatra, Indonesia. *International Journal of Science and Business*, 64-73.
- Setiyanningrum, Irna. (2017). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Pengawasan Terhadap Realiasi APBD Dengan Konsep Value For Money Pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Di Yogyakarta.
- Situmorang, Syafrizal Helmi dan Muslich Lufti, 2014. *Analisis Data untuk Riset Manajemen dan Bisnis*. Medan: Usu Press.
- Sopannah, Wahyudi Isa 2009 Pengaruh Akuntansi Publik, Partisipasi Masyarakat Dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Anggaran Dengan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) *Jurnal Akuntansi*.
- Sulistoni G, 2013, Fiqh Korupsi : Amanah VS Kekuasaan, Somasi, Nusa Tenggara Barat.
- Sumarsono, Hadi. (2009). *Analisis Kemandiria Otonomi Daerah*, JESP Vol.1, 2009
- Ulum, MD Ihyaul. 2009, *Audit Sektor Publik*, Bumi Aksara Jakarta.
- Vanesa, Y. Y., Matondang, R., Sadalia, I., & Daulay, M. T. (2019). 11. The Influence Of Organizational Culture, Work Environment And Work Motivation On Employee Discipline In PT Jasa Marga (Persero) TBK, Medan Branch, North Sumatra, Indonesia. *American International Journal of Business Management (AIJBM)*, 37-45.
- Wakhyuni, E., Setiawan, A., Adnalin, A., Sari, D. S., Pane, D. N., Lestario, F., et al. (2018). ROLE OF FOREIGN CULTURE AND COMMUNITY IN PRESERVING CULTURAL RESILIENCE. *International Journal of Civil Engineering and Technology (IJCIET)*, 508-516.
- Yunus, R. N. (2018). Analisis Pengaruh Bahasa Merek Terhadap Keputusan Pembelian Pada Mahasiswa Universitas Pembangunan Panca Budi Jurusan Akuntansi. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 9(1), 13-20.

<http://www.rmolsumut.com/read/2017/04/13/46600/Anggaran->

[Sudah-](#) Diperbesar,-Kinerja-Dinas-PU-Medan-Masih-Tak-Becus-